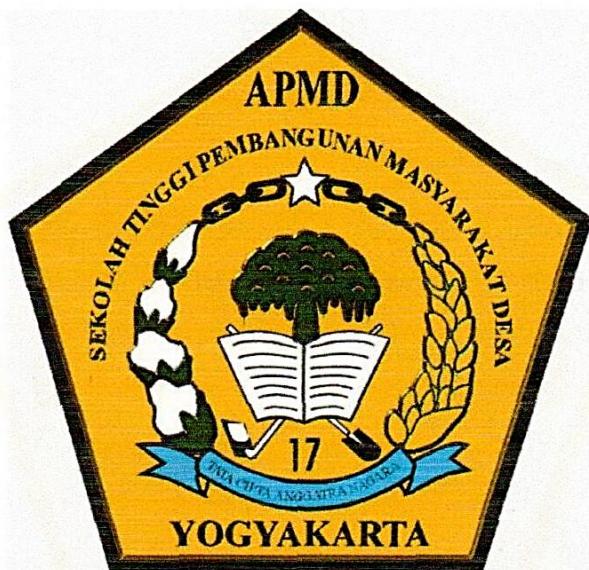


SKRIPSI
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIKERTO DALAM
MELINDUNGI PETANI SALAK

(Studi di Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Daerah
Istimewa Yogyakarta)



Disusun Oleh:

ANJELINAHUN KURNIA
20520017

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA

2025



HALAMAN JUDUL

PEMERINTAH KALURAHAN GIRIKERTO DALAM

MELINDUNGI PETANI SALAK

(Studi di Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Daerah
Istimewa Yogyakarta)



Disusun Oleh:

ANJELINAHUN KARUNIA

20520017

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Senin

Tanggal : 11 Agustus 2025

Waktu : Pukul 09.30 s.d. Selesai

Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

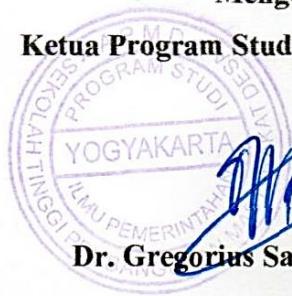
Analius Giawa, S.IP., M.Si
Ketua Penguji/Pembimbing

Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si
Penguji Samping I

Dr. Raden Yoseph Gembong Rahmadi, S.H., M.Hum
Penguji Samping II

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anjelinahun Karunia

NIM : 20520017

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul PEMERINTAH KALURAHAN GIRIKERTO DALAM MELINDUNGI PETANI SALAK (Studi di Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta) adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 Agustus 2025



Anjelinahun Karunia
20520017

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKDEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Langkap : Anjelinahun Karunia
NIM : 20520017
Telp : 081326575895
Email : anjelinahunk@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Dengan ini memberikan izin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul: PEMERINTAH KALURAHAN GIRIKERTO DALAM MELINDUNGI PETANI SALAK (Studi di Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)

Izin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right).

Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk akibat hukum di kemudian hari apabila dikemudian hari ternyata terdapat pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Yogyakarta, 01 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Anjelinahun Karunia
20520017

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas berkat dan Rahmat-Nya yang melimpah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semoga bermanfaat bagi banyak orang. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasi penulis karena berkat doa dan dukungan mereka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kekuatan, dan petunjuk-Nya yang tidak pernah berhenti mengalir dalam setiap langkah hidup saya. Tanpa kasih-Nya, saya bukanlah apa-apa.
2. Mama (F.Eta) yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan cinta tanpa syarat. Terima kasih atas setiap air mata, pelukan hangat, dan nasihat yang menuntun saya hingga hari ini.
3. Papa (R.Langgi) panutan hidup yang mengajarkan arti ketegasan, tanggung jawab, dan kerja keras. Terima kasih atas semangat dan teladan hidup yang telah papa tunjukkan.
4. Diri saya sendiri (Anjelinahun karunia) yang terus berjuang, belajar dari kegagalan, dan tidak menyerah walau dalam keterbatasan. Terima kasih karena telah bertahan sejauh ini.
5. Seseorang yang dirahasiakan yang kehadirannya menjadi pelita dalam kegelapan, memberi makna dalam diam, dan mengajarkan arti ketulusan lewat cara yang tidak biasa. Terima kasih karena sudah ada.

MOTTO

(Filipi 4:13)

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku

(R.Langgi)

Ingat kata mama, Ferdian Tuti Eta.

(Diosmali)

Jangan pernah takut untuk bermimpi Karena Mimpi itu Mungkin saja terjadi

(Anjelinahun karunia)

Kadang kita perlu melewati hal terburuk untuk mendapatkan hal Terbaik Untuk
itu Lakukan dengan hati Karena yang dari hati akan sampai ke hati

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “PEMERINTAH KALURAHAN GIRIKERTO DALAM MELINDUNGI PETANI SALAK (Studi di Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu, di kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan kepada penulis, khususnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.si selaku ketua STPMD”APMD” Yogyakarta.
3. Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A selaku Kaprodi yang telah memberikan arahan, dukungan, dan kesempatan kepada penulis untuk berkembang serta menyelesaikan karya ini dengan baik. Dedikasi dan komitmen Bapak sebagai Kaprodi menjadi inspirasi bagi penulis untuk terus belajar dan berproses secara akademis maupun pribadi.
4. Analius Giawa, S,IP., M.SI selaku Dosen pembimbing yang sudah bersedia mengarahakan saya sebagai mana mestinya, sehingga saya bisa mencantumkan namanya di dalam Kata pengantar ini sebagai tanda penyelesaian tugas akhir ini.
5. Ibu Dra. B Hari Saptanig Tyas, M.Si selaku dosen penguji satu yang sudah bersedia untuk membantu dan membimbing penulis serta sumbangan pemikiran, pengetahuan dan gagasannya.
6. Bapak Dr Raden Yoseph Gembong Rahmani, S.H., M.Hum selaku dosen penguji dua yang sudah beredia untuk membantu dan membimbing penulis serta sumbangan pemikiran, pengetahuan dan gagasannya.

7. Pemerintah Kalurahan Girikerto dan Masyarakat yang bersedia menerima saya sebagimana mestinya seorang pelajar, dalam melaksanakan penelitian skripsi ini saya ucapkan Terimakasih
8. Penulis ucapkan Terimakasih kepada figur yang tidak saya temukan di siapapun itu, adalah mama saya yang sudah pergi namun selalu ada, tidak banyak kata untuk menggambarkan sosok hebat ini.
9. Terimakasih untuk pahlawan yang selalu berdiri paling depan untuk putri kecil semata wayangnya sekali lagi terimakasih papa
10. Untuk kamu Dios mali terimakasih sudah sampai di tulisan ini.
11. Terimakasih sudah sampai sejauh ini sudah bertahan sejauh ini,ini bukan akhir namun ini awal dari sebuah perjalanan (Anjelina)
12. Terimakasih untuk orang-orang baik yang ada di sekitar saya Aksen Febriyanto Karunia,Cahandra Karunia dan Hosea di saat saya lelah selalu memberikan semangat
13. Terimakasih banyak untuk segalanya yang Tuhan beri sampai saat ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
INTISARI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Literatur Review.....	7
G. Kerangka Konseptual	14
1. Pemerintah.....	14
2. Pemerintah Desa.....	17
3. Proteksi (Perlindungan).....	20
4. Petani.....	26
H. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Unit Analisis Penelitian	29

3. Metode Pengumpulan Data	31
4. Teknik Analisis Data.....	39
BAB II DESKRIPSI PETANI SALAK DI KALURAHAN GILIKKERTO..	47
A. Sejarah Kalurahan	47
B. Kondisi Alam Kalurahan Girikerto	56
C. Kondisi Geografis	59
D. Pemerintahan dan Lembaga	61
E. Sejarah Salak.....	68
BAB III PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MELINDUNGI PETANI SALAK	74
A. Ketersediaan regulasi yang berpihak kepada petani.....	74
B. Peran sebagai Fasilitator	86
C. Pandangan Petani terhadap Peran Dinas Pertanian	98
D. Pandangan Petani terhadap Peran DPRD Sleman.....	108
E. Peran sebagai Dinamisator.....	112
F. Peran sebagai Katalisator	114
BAB IV PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN.....	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Nama-Nama Informan Penelitian.....	30
Tabel 2. 1 Jenis Lahan.....	50
Tabel 2. 2 Jenis Tanaman	51
Tabel 2. 3 Nama Padukuhan.....	55
Tabel 2. 4 Jenis Produk Olahan Dari Salak	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Jumlah Petani Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
Gambar 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	49
Gambar 2. 3 Luas Lahan Salak	51
Gambar 2. 4 Produksi Salak.....	52
Gambar 2. 5 Produksi Salak Pondoh Di Kalurahan Girikerto	53
Gambar 2. 6 Data Penduduk Berdasarkan Agama	54
Gambar 2. 7 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pendidikan	54
Gambar 2. 8 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	55
Gambar 2. 9 Struktur Pemerintah Kalurahan Girikerto	68
Gambar 2. 10 Kepemilikan Lahan Organik Endang Styomurni	70
Gambar 2. 11 Potensi Wisata Agro Salak Pondoh	72

INTISARI

Pertanian salak pondoh sebagai komoditas unggulan di Kalurahan Girikerto menghadapi tantangan serius berupa alih fungsi lahan, fluktuasi harga pasar, dan kerentanan sosial-ekonomi petani. Penurunan luasan lahan salak dari 106 hektar menjadi 87 hektar dalam lima tahun terakhir serta dominasi tengkulak dalam rantai distribusi menunjukkan lemahnya posisi tawar petani. Di tengah kondisi tersebut, perlindungan terhadap petani menjadi urgensi strategis, seiring dengan meningkatnya ancaman terhadap ketahanan pangan lokal dan menurunnya regenerasi petani muda. Hal inilah yang menjadikan topik ini layak untuk diteliti, khususnya dalam melihat sejauh mana pemerintah desa berperan sebagai pelindung dan penggerak pertanian lokal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan perangkat desa dan petani, serta dokumentasi administratif. Peneliti fokus pada upaya proteksi yang dilakukan pemerintah Kalurahan Girikerto melalui peran sebagai fasilitator, dinamisator, katalisator, dan regulator. Validitas data diuji menggunakan triangulasi sumber dan metode, serta dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan memilih informan yang relevan seperti Kepala Urusan Pembangunan, Dukuh, dan petani aktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah melakukan beberapa upaya seperti pelatihan, penguatan kelompok tani, dan fasilitasi pemasaran, namun belum terdapat kebijakan desa yang spesifik dalam menahan alih fungsi lahan salak atau intervensi harga saat panen raya. Perlindungan yang dilakukan bersifat sporadis dan belum menyentuh akar persoalan seperti ketergantungan pada tengkulak atau minimnya kelembagaan ekonomi petani. Penelitian ini merekomendasikan agar Kalurahan Girikerto menyusun regulasi perlindungan harga dan lahan, memperkuat koperasi tani, serta membangun ekosistem agribisnis yang partisipatif dan berkelanjutan.

Keywords: Pemerintah Desa, Petani Salak,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian merupakan fondasi penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama dalam menjamin ketahanan pangan dan menyediakan lapangan kerja di pedesaan. Namun, sektor ini tengah menghadapi tantangan serius. Berdasarkan Sensus Pertanian 2023 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah unit usaha pertanian menurun dari 31,72 juta pada tahun 2013 menjadi hanya 29,36 juta pada tahun 2023. Lebih jauh, hanya 21,93% petani yang berasal dari generasi muda, menunjukkan krisis regenerasi yang mengancam keberlanjutan pertanian nasional.

Kondisi ini juga tercermin di Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, yang merupakan salah satu sentra utama produksi salak pondoh. Meskipun komoditas ini telah mendapat pengakuan Indikasi Geografis (IG), kenyataannya manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan oleh para petani. Petani salak di Girikerto menghadapi berbagai tantangan kompleks, mulai dari fluktuasi harga yang ekstrem, minimnya akses pasar, hingga serangan hama seperti lalat buah yang dapat menyebabkan kerugian produksi hingga 70%.

Penurunan minat petani terhadap budidaya salak menjadi sangat mencolok dalam lima tahun terakhir. Data lapangan menunjukkan bahwa luas lahan salak di Kalurahan Girikerto menyusut dari sekitar 106 hektar pada tahun 2019 menjadi hanya 87 hektar pada tahun 2024. Alih fungsi lahan ini sebagian besar dilakukan oleh petani sendiri yang beralih ke tanaman

hortikultura lain seperti cabai dan tomat karena dianggap lebih menguntungkan dalam jangka pendek. Selain itu, jumlah petani salak aktif juga menurun, dari sekitar 380 orang pada tahun 2020 menjadi hanya sekitar 260 orang pada tahun 2024.

Salah satu penyebab utama penurunan ini adalah rendahnya harga jual salak saat panen raya. Harga bisa anjlok hingga Rp2.000–Rp3.000/kg, jauh di bawah biaya produksi. Tanpa adanya mekanisme perlindungan harga atau intervensi pasar dari pemerintah desa, petani berada dalam posisi yang sangat rentan secara ekonomi. Situasi ini memperkuat alasan petani untuk meninggalkan komoditas yang selama ini menjadi identitas lokal Kalurahan Girikerto.

Dalam konteks ini, peran Pemerintah Kalurahan Girikerto sangat penting sebagai pelindung (protektor) dan fasilitator pembangunan pertanian. Pemerintah Kalurahan memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk hadir dalam situasi rentan ini melalui tindakan konkret yang membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini meliputi: menyusun kebijakan perlindungan lahan budidaya salak, memfasilitasi akses petani ke pasar, melakukan pendampingan teknis, serta mendorong inovasi pascapanen dan diversifikasi produk.

Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa peran tersebut belum dioptimalkan. Belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur atau membatasi alih fungsi lahan salak. Kegiatan pemberdayaan petani yang dilaksanakan masih bersifat sporadis, tidak menyentuh akar persoalan

struktural seperti posisi tawar petani terhadap tengkulak, kelembagaan kelompok tani yang lemah, serta minimnya jaminan harga.

Krisis regenerasi petani juga menjadi masalah serius di Girikerto. Sebagian besar petani salak berusia di atas 45 tahun, sementara generasi muda menunjukkan minat yang sangat rendah terhadap sektor ini. Rendahnya insentif ekonomi dan tidak adanya jaminan penghidupan yang layak menjadi alasan utama generasi muda enggan melanjutkan usaha tani keluarga.

Padahal, perlindungan terhadap petani telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang menekankan bahwa negara (termasuk pemerintah desa sebagai bagian dari struktur pemerintahan) berkewajiban menjamin ketersediaan sarana produksi, memberikan jaminan harga yang adil, dan memfasilitasi akses pembiayaan. Namun implementasinya di Kalurahan Girikerto masih belum maksimal akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan dan tidak adanya kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.

Penelitian ini menjadi penting untuk menggali sejauh mana Pemerintah Kalurahan Girikerto menjalankan peran protektif dan fasilitatif terhadap petani salak, terutama dalam merespons tren alih fungsi lahan, fluktuasi harga, serta tantangan regenerasi petani. Fokus utama terletak pada bagaimana desa mengembangkan kebijakan lokal, memanfaatkan potensi kelembagaan desa, serta memperkuat posisi tawar petani dalam rantai nilai salak pondoh.

Dengan pendekatan kualitatif dan basis data lapangan, penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan kontekstual bagi

Kalurahan Girikerto, agar dapat menjalankan fungsi perlindungan dan pemberdayaan secara lebih efektif. Proteksi terhadap petani tidak cukup hanya dengan regulasi, melainkan harus dibarengi dengan aksi nyata dan komitmen jangka panjang dari pemerintah desa untuk menjaga eksistensi komoditas lokal, menguatkan daya saing petani, dan menciptakan pertanian yang berkelanjutan serta berkeadilan sosial.

Untuk menelaah Perlindungan Petani Salak oleh Pemerintah Kalurahan Girikerto, penelitian ini dipandu oleh perspektif Governing. Stephen Cook (2007), dalam bukunya *Ruling But Not Governing*, membedakan secara tegas antara konsep "memerintah" (governing) dan "menguasai" (ruling). Buku tersebut berangkat dari kajian terhadap sejarah perkembangan militer dan politik di Mesir, di mana kekuatan militer mendominasi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun, dominasi militer tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pemerintahan karena militer tidak menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan seperti mengatur dan mengurus masyarakat. Dalam konteks ini, peran militer lebih tepat disebut sebagai "menguasai" (ruling), bukan "memerintah" (governing).

Cook menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara ruling dan governing. Ruling dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk aktor non-pemerintah seperti militer, dan berkonotasi pada penguasaan yang bersifat dominatif. Sementara itu, governing berkaitan erat dengan otoritas resmi yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan yang sah. Memerintah dalam konteks ini berarti melaksanakan otoritas politik (exercising political authority) yang dijalankan oleh pemerintah yang memiliki legitimasi.

Secara sederhana, Governing berkaitan dengan perbuatan pemerintah. secara ideal normatif, governing melekat pada pemerintah dan mempunyai otoritas yang menjadi sebuah legitimasi untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dalam pengertian dasar, memerintah adalah adalah penggunaan otoritas politik yang dipegang oleh pemerintah. Governing diartikan sebagai kata kerja yaitu memerintah, di mana kata memerintah tidak lazim digunakan dalam kosa kata pemerintahan. Kata yang lazim digunakan dalam pemerintahan adalah menyelenggarakan pemerintahan, karena menyelenggarakan pemerintahan berarti ada otoritas yang mengatur dan mengurus. Konsep governing yang dipahami sebagai upaya untuk mengatur dan mengurus harus memiliki proses, fungsi, dan hasil. Governing mengandung proses politik, hukum, dan administrasi. Pembentukan hukum dan kebijakan adalah perbuatan penting pemerintah dalam governing. Gagasan ideal dalam konteks ini adalah fungsi ekstraksi, distribusi, proteksi, dan kohesi yang dijalankan oleh pemerintah atas negara, warga dan masyarakat (Sutoro Eko, 2021: 12-13).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang di angkat oleh peneliti adalah Bagaimana Peran Pemerintah Kalurahan Girikerto dalam Melindungi Petani Salak?

C. Fokus Penelitian

Adapun dalam penelitian ini fokus penelitian yang di ambil oleh peneliti adalah :

1. Ketersediaan regulasi yang berpihak kepada petani.
2. Peran Pemerintah Kalurahan Girikerto dalam Melindungi Patani Salak
3. Pandangan Petani Salak Terhadap Peran Dinas Pertanian
4. Pandangan Petani Salak Terhadap Peran DPRD Kabupaten Sleman
5. Peran Pemerintah Kalurahan Girikerto Sebagai Dinamisator
6. Peran Pemerintah Kalurahan Girikerto Sebagai Katalisator

D. Tujuan Penelitian

Melihat dari fokus penelitian di atas, maka di rumuskan tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsi terkait perlindungan terhadap petani salak ole Pemerintah Kalurahan Girikerto.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini manfaat penelitian yang diharapkan bagi pembaca adalah :

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu pemerintahan desa, khususnya dalam konteks perlindungan petani di tingkat lokal.
2. Memberikan inspirasi bagi desa-desa lain yang memiliki komoditas unggulan serupa dalam mengembangkan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani.

F. Literatur Review

Dalam literatur review ini, menjelaskan tentang bagaimana relevansi penggunaan jurnal yang menjadi sumber acuan peneliti dalam penulisan proposal ini. Dalam literatur review ini di jelaskan mengenai bagaimana kelebihan, kekurangan, dan kebaharuan yang akan menjadi sumber informasi baru yang akan di dapat oleh pembaca.Pertama, Artikel oleh Ibnu Maulana Zahida, Sri Reski Putri, dan Aditya Satrio Wicaksono dalam jurnal berjudul "Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Kabupaten Trenggalek)" (2021), menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap potensi produk lokal melalui skema Indikasi Geografis (IG). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris dan bertujuan menganalisis perlindungan hukum secara preventif dan represif terhadap produk khas daerah, serta menggali potensi IG sebagai strategi penguatan ekonomi daerah dan *city branding*. Produk lokal yang dijadikan fokus utama adalah durian IDF, kopi Wilis, dan ikan asap Watulimo, yang dianggap memiliki karakteristik geografis khas namun belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya peran aktif pemerintah daerah dalam mendaftarkan IG, sehingga perlindungan atas produk-produk tersebut masih belum optimal.

Kedua, Artikel oleh Dylla Hanggaeni Dyah Puspaningrum dkk. (2024) dalam jurnal "Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Kombucha Salak Bali Kelompok Tani Mekar Sari, Sibetan, Karangasem, Bali", yang diterbitkan dalam I-Com: *Indonesian Community Journal*. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan pembuatan kombucha berbahan dasar salak Bali kepada Kelompok Tani Mekar Sari di Desa Sibetan, Karangasem, Bali, berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengolah salak menjadi produk bernilai tambah. Melalui pendekatan partisipatif, para peserta memahami proses fermentasi, pentingnya sanitasi alat, serta manfaat kesehatan kombucha sebagai minuman probiotik. Kegiatan ini juga mendorong kesadaran akan pentingnya diversifikasi produk pertanian dan membuka peluang pemasaran melalui media sosial serta platform e-commerce. Meski demikian, hasil evaluasi menunjukkan perlunya pendampingan lanjutan terkait pengembangan produk, informasi gizi, dan strategi pemasaran agar keberlanjutan program dapat terjaga dan memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi petani salak.

Ketiga, Artikel oleh Ening Ariningsih dkk. (2022) dalam Jurnal berjudul “Kerugian Ekonomi dan Manajemen Pengendalian Serangan Lalat Buah pada Komoditas Hortikultura di Indonesia”, yang diterbitkan dalam Forum Penelitian Agro Ekonomi, mengulas secara komprehensif dampak serangan lalat buah terhadap komoditas hortikultura serta strategi pengendaliannya di Indonesia. Jurnal ini menggunakan pendekatan studi pustaka untuk mengidentifikasi jenis lalat buah, tanaman inangnya, potensi kerugian ekonomi, dan strategi pengendalian yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa serangan lalat buah, khususnya dari genus Bactrocera, menjadi ancaman serius bagi produksi buah-buahan dan sayuran, termasuk komoditas salak. Tingkat kerusakan

akibat serangan lalat buah bervariasi antara 13,5% hingga 70%, dan bahkan pada beberapa daerah tertentu dapat mencapai 100%. Salak, sebagai salah satu komoditas yang disoroti, tercatat mengalami kerugian ekonomi hingga Rp2,5 triliun per tahun akibat serangan lalat buah. Jurnal ini menekankan pentingnya pengendalian hama terpadu (PHT) dan manajemen pengendalian skala luas (Area-Wide Management/AWM) sebagai strategi efektif. Program-program seperti SIMPOK (Sistem Manajemen Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Skala Kawasan) juga diperkenalkan sebagai solusi inovatif untuk pengendalian lalat buah secara terstruktur dan berkelanjutan.

Keempat, Deslaely Putranti dan Dewi Analis Indriyani (2021) dalam jurnal “Perlindungan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi di Yogyakarta” yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 15 No. 3, membahas bagaimana komunitas pelindung IG (MPIG) melanjutkan pengelolaan dan perlindungan produk setelah sertifikasi IG, dengan fokus pada Salak Pondoh Sleman dan Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal dan menyoroti realitas di lapangan bahwa sertifikasi IG belum selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani. Penelitian ini mengungkap bahwa MPIG Salak Pondoh Sleman mengalami stagnasi pasca-sertifikasi. Tidak ada peningkatan signifikan dalam harga atau permintaan salak meskipun telah memperoleh status IG. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap manfaat IG, tumpang tindih peran antara MPIG dan asosiasi petani, dan tidak adanya diferensiasi yang jelas dalam pemasaran salak IG dan non-

IG. MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta menunjukkan keberhasilan dalam menjaga keberlanjutan produksi dan pemasaran pasca-sertifikasi, dengan kenaikan pendapatan hingga 50%. Keberhasilan ini didukung oleh faktor-faktor seperti komunikasi internal yang solid, dukungan stakeholder, dan edukasi yang intensif.

Keenam, Artikel oleh Nesia Nersi (2024) dalam skripsi berjudul “Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Produk Olahan Salak di Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman”, berfokus pada peran pemerintah desa dalam mengembangkan UMKM berbasis olahan salak. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis keterampilan, pengetahuan, motivasi, serta faktor penghambat dan pendukung yang dimiliki pemerintah desa dalam mendukung pelaku UMKM di wilayahnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun pemerintah Kalurahan memiliki potensi untuk menjadi penggerak utama dalam pemberdayaan ekonomi, implementasi program yang mendukung UMKM produk olahan salak masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari kurangnya pendampingan teknis, rendahnya pengetahuan tentang tata kelola usaha, dan belum optimalnya motivasi serta sinergi antara pemerintah desa dan pelaku UMKM.

Ketujuh, Artikel oleh Georgia Tiara Nirmalasari (2024) dalam skripsi berjudul “Proteksi Petani Salak Pondoh di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman” bertujuan untuk menelusuri sejauh mana strategi dan langkah-langkah pemerintah desa dalam melindungi petani salak pondoh,

baik melalui kebijakan, penyediaan fasilitas, pelatihan, hingga pemasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta melibatkan 9 informan dari unsur pemerintah desa, dukuh, petani, dan pengepul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya proteksi dari pihak pemerintah desa, seperti pemberian sarana-prasarana dan pelatihan, namun implementasi perlindungan terhadap petani salak masih belum maksimal. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain kurangnya edukasi dan pendampingan teknis, rendahnya perhatian terhadap sistem pemasaran, serta minimnya keterlibatan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan akses terhadap pupuk.

Kedelapan, Artikel oleh Anggreyni Raintung, Sarah Sambiran, dan Ismail Sumampow (2021) dalam jurnal *Governance* Vol. 1 No. 2 berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya”, membahas bagaimana pemerintah desa menjalankan peran strategisnya dalam memberdayakan kelompok tani sebagai bagian dari pembangunan ekonomi pedesaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan fokus pada empat peran utama pemerintah desa menurut Arif dalam Adhawati (2012), yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah desa di Desa Mobuya telah berupaya membentuk kelompok tani dan memberikan pelatihan, namun pelaksanaan program belum optimal. Banyak petani belum mendapatkan bantuan sesuai kebutuhan, partisipasi dalam pelatihan masih rendah, dan fasilitas seperti pupuk maupun bibit sering tidak tepat sasaran. Selain itu, pemerintah desa belum membuat kebijakan lokal yang secara

khusus mendukung kerja kelompok tani, hanya menjalankan ketentuan dari peraturan nasional.

Kesembilan, Artikel oleh Andi Tenri Nippi dan Andi Pananrangi M (2019), dalam jurnal Meraja Vol. 2 No. 1, meneliti “Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani” dengan studi kasus di Desa Siawung, Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang diterapkan pemerintah desa dalam mendukung penguatan kelompok tani. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada tiga strategi pemberdayaan, yaitu menciptakan iklim yang kondusif (enabling), memperkuat daya (empowering), dan melindungi (protecting) masyarakat tani. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemerintah desa telah berupaya membentuk komunikasi yang baik dengan kelompok tani, memberikan bantuan seperti alat pertanian dan bibit, serta melakukan pemberdayaan melalui musyawarah bersama petani. Namun, pelaksanaan strategi tersebut masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan seperti minimnya anggaran, kurangnya infrastruktur pertanian, serta keterbatasan alat dan fasilitas pendukung lainnya. Meskipun demikian, peran pemerintah desa sebagai penggerak pembangunan dan pelindung petani sudah mulai terlihat melalui kebijakan-kebijakan awal yang partisipatif dan responsive.

Kesepuluh, Artikel oleh Vinda Kusuma Anggraeni, Eny Lestari, dan Widiyanto (2015) dalam Jurnal nya berjudul “Strategi Adaptasi Petani Salak terhadap Dampak Erupsi Merapi di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang” yang dimuat dalam Jurnal AGRISTA Vol. 3 No. 2, meneliti

bagaimana petani salak di lereng Merapi menghadapi dampak sosial, ekonomi, dan ekologi akibat bencana alam. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik snowball sampling, penelitian ini menggambarkan secara rinci bentuk adaptasi petani salak di Desa Kaliurang dan Ngablak, Kecamatan Srumbung. Penelitian ini menunjukkan bahwa bencana erupsi Merapi menyebabkan kerusakan parah pada komoditas salak sebagai mata pencaharian utama warga. Untuk mengatasi kondisi tersebut, petani menjalankan berbagai strategi adaptasi seperti memanfaatkan hubungan sosial untuk pinjaman, menjual hasil panen sisa, melakukan tanam sela, menggunakan tabungan, menjual ternak dan ikan, hingga bekerja serabutan seperti menjadi penambang pasir. Pemerintah turut hadir melalui bantuan pupuk organik, program padat karya, rehabilitasi lahan, dan bantuan luar negeri (SKR) untuk pemulihan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap peran kelembagaan desa sebagai aktor utama dalam perlindungan petani salak secara menyeluruh. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang umumnya menyoroti aspek hukum indikasi geografis, pemberdayaan teknis petani, pengolahan hasil panen, maupun strategi adaptasi terhadap bencana, penelitian ini menempatkan Pemerintah Kalurahan sebagai subjek aktif dalam melindungi petani melalui kebijakan, regulasi lokal, edukasi, fasilitasi pasar, dan penguatan kelembagaan. Dengan pendekatan mikro yang menekankan praktik langsung di tingkat desa, studi ini menjembatani kekosongan literatur sebelumnya yang belum menggali secara dalam bagaimana desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan petani dapat

menciptakan sistem perlindungan yang holistik, partisipatif, dan berkelanjutan.

G. Kerangka Konseptual

1. Pemerintah

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, pemerintah memiliki posisi sentral sebagai pelaksana kekuasaan negara. Pemerintah tidak hanya hadir sebagai entitas administratif yang menjalankan kebijakan, tetapi juga merupakan cerminan dari kedaulatan rakyat, hukum, dan tanggung jawab moral negara terhadap warganya. Pemerintah menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan fungsi-fungsi dasar negara seperti penegakan hukum, pelayanan publik, perlindungan hak-hak warga negara, dan menjamin kesejahteraan rakyat.

Menurut Mulawati dan Nurdin (2019), pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap jalannya sistem pemerintahan secara menyeluruh, termasuk pengaturan struktur birokrasi, pelaksanaan perundang-undangan, serta penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Mereka menegaskan bahwa pemerintah adalah instrumen negara yang bertindak untuk dan atas nama kepentingan rakyat, sehingga legitimasi pemerintah tidak hanya bersumber dari hukum positif, tetapi juga dari kepercayaan rakyat yang dilayani (Mulawati & Nurdin, 2019).

Dalam perspektif pemerintahan modern, eksistensi pemerintah tidak dapat dilepaskan dari konsep *governance* atau tata kelola

pemerintahan. Alam (2019) menjelaskan bahwa *governance* adalah proses pengambilan keputusan dan implementasinya secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dengan kata lain, pemerintah tidak lagi dipahami sebagai satu-satunya aktor pengendali kekuasaan, melainkan menjadi bagian dari jaringan yang terdiri dari aktor-aktor negara dan non-negara yang bekerja sama mewujudkan tujuan bersama (Alam, 2019). Dalam hal ini, pemerintah nasional dituntut untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dan menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Sebagaimana dikembangkan oleh UNDP dan World Bank, *good governance* mencakup unsur-unsur utama seperti akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, efektivitas, efisiensi, dan inklusivitas. Pemerintah nasional dituntut untuk membangun sistem yang memungkinkan warga negara terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik, baik melalui jalur formal maupun informal. Mulawati dan Nurdin (2019) menambahkan bahwa dalam konteks demokrasi digital saat ini, transparansi informasi menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan sistem pelayanan dan informasi yang terbuka, mudah diakses, serta ramah terhadap kebutuhan warga.

Pemahaman terhadap pemerintah nasional juga perlu dikaitkan dengan konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan. Dalam sistem ini, pemerintah bertanggung jawab secara langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan,

jaminan sosial, dan kesempatan kerja. Seperti diungkapkan dalam jurnal "Asas-Asas Pemerintahan yang Baik dalam *Welfare State*" (2021), negara yang menganut prinsip *welfare state* tidak sekadar menjadi wasit dalam dinamika pasar dan masyarakat, tetapi aktif mengambil peran dalam mengatur dan mendistribusikan sumber daya demi keadilan sosial.

Dalam rangka menjalankan prinsip-prinsip tersebut, pemerintah harus bertumpu pada asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas kecermatan. Prinsip ini menjadi pedoman etik dan administratif dalam seluruh tindakan penyelenggaraan pemerintahan nasional. Jika prinsip-prinsip ini dijalankan dengan baik, maka legitimasi, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat secara signifikan.

Berdasarkan Penjelasan di atas dapat diartikan bahwa pemerintah adalah lembaga inti dalam sistem ketatanegaraan yang bertugas menjalankan kekuasaan negara atas dasar hukum dan mandat rakyat. Lebih dari sekadar pelaksana administrasi, pemerintah berfungsi sebagai pengatur, pelayan publik, dan pelindung hak-hak warga negara. Dalam pemerintahan modern, pemerintah berperan dalam tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, bekerja sama dengan aktor negara dan non-negara untuk mencapai tujuan bersama.

Sebagai pilar negara kesejahteraan, pemerintah juga bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak dasar warga serta distribusi keadilan sosial. Seluruh kebijakan dan tindakannya harus berlandaskan pada asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB) untuk menjamin legitimasi, efisiensi, dan kepercayaan publik.

2. Pemerintah Desa

a. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan entitas pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan luas untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik berbasis kearifan lokal dan potensi wilayah. Hal ini membuka ruang yang besar bagi desa untuk menjadi aktor penting dalam melindungi dan memberdayakan petani.

Adhawati (2012) menyebutkan empat peran strategis pemerintah desa, yaitu sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator. Dalam peran sebagai regulator, pemerintah desa dapat menyusun kebijakan lokal seperti Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tata niaga pertanian, perlindungan harga panen, hingga pengaturan penggunaan pupuk bersubsidi. Sebagai fasilitator, desa menjembatani hubungan antara petani dan berbagai stakeholder, seperti dinas pertanian, koperasi tani, atau

lembaga keuangan. Dalam peran sebagai dinamisator, desa harus mampu menghidupkan kegiatan pertanian melalui pelatihan, pembentukan kelompok tani, serta memperkuat partisipasi masyarakat. Sedangkan sebagai katalisator, desa mendorong terjadinya inovasi pertanian, seperti pengembangan produk olahan salak dan penguatan UMKM berbasis pertanian.

Sutoro Eko (2011) menekankan bahwa dalam era otonomi desa, pemerintah desa tidak boleh hanya menjadi pelaksana proyek dari atas, tetapi harus menjadi penggerak pembangunan berbasis komunitas. Desa harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah lokal secara mandiri, menyusun rencana kerja pembangunan desa yang partisipatif, serta mengalokasikan Dana Desa secara tepat guna untuk kepentingan masyarakat tani.

Dalam kenyataannya peran pemerintah desa sering kali belum berjalan optimal. Penelitian Nesia Nersi (2024) mengungkap bahwa meskipun pemerintah desa telah memiliki program pemberdayaan UMKM produk olahan salak, banyak dari program tersebut belum menyentuh akar persoalan petani secara menyeluruh. Keterbatasan kapasitas, kurangnya sumber daya manusia, dan minimnya inovasi menjadi kendala yang menghambat efektivitas kebijakan. Oleh sebab itu, penelitian ini memandang perlu untuk mengkaji sejauh mana pemerintah desa benar-benar menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan terhadap petani salak, tidak hanya dalam bentuk

bantuan teknis, tetapi juga dalam bentuk kebijakan dan keberpihakan.

b. Fungsi Pemerintah Desa

Dalam menjalankan perannya, pemerintah desa memiliki sejumlah fungsi yang saling berkaitan dalam mendukung pembangunan dan perlindungan masyarakat desa, termasuk petani. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), fungsi utama pemerintah desa mencakup fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, fungsi pembangunan, dan fungsi perlindungan. Fungsi pelayanan diwujudkan melalui penyediaan layanan administratif dan sosial yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam konteks petani salak, pelayanan ini bisa berupa pengurusan administrasi kelompok tani, distribusi pupuk bersubsidi, atau akses terhadap program asuransi pertanian.

Fungsi pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian warga desa melalui pelatihan, fasilitasi akses pasar, dan pembentukan kelembagaan ekonomi. Pemerintah desa juga menjalankan fungsi pembangunan dengan merancang dan melaksanakan kegiatan fisik maupun non-fisik yang menunjang produktivitas warga, seperti pembangunan jalan tani, irigasi, atau pelatihan pascapanen. Sementara itu, fungsi perlindungan menekankan pada upaya menjaga hak dan keberlangsungan hidup masyarakat dari berbagai ancaman,

termasuk risiko ekonomi dan bencana alam. Dalam hal ini, perlindungan petani salak dapat berupa kebijakan stabilisasi harga, penguatan kelompok tani, hingga advokasi hak atas tanah pertanian.

Fungsi-fungsi ini berjalan secara simultan dan harus saling memperkuat. Pemerintah desa tidak hanya dituntut untuk merespons persoalan dengan kebijakan jangka pendek, tetapi juga merancang strategi jangka panjang yang menjamin keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat tani. Dengan memahami dan mengimplementasikan keempat fungsi tersebut secara konsisten, pemerintah desa akan mampu menjadi garda terdepan dalam menciptakan desa yang berdaya, mandiri, dan tahan terhadap krisis, terutama dalam sektor strategis seperti pertanian salak.

3. Proteksi (Perlindungan)

Proteksi atau perlindungan terhadap petani merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem agrikultur, terutama untuk menjamin keberlanjutan produksi dan kesejahteraan petani sebagai aktor utama. Dalam konteks petani salak, proteksi sangat dibutuhkan karena mereka rentan terhadap berbagai guncangan, baik dari segi harga, iklim, serangan hama, hingga distribusi hasil panen. Perlindungan ini harus diberikan oleh lembaga yang paling dekat dengan petani, yaitu pemerintah desa. Perlindungan dimaknai bukan hanya dalam bentuk bantuan atau pemberian insentif, tetapi sebagai sistem kebijakan dan

strategi desa yang menyentuh berbagai dimensi kehidupan petani: produksi, sosial, ekonomi, dan hukum.

Menurut Robert Sherwood (1990) dalam Intellectual Property and Economic Development, proteksi terhadap sektor ekonomi rakyat, termasuk pertanian, harus mencakup insentif ekonomi yang mendorong pelaku kecil untuk tumbuh dalam sistem yang adil. Ia menekankan pentingnya perlindungan hukum dan kebijakan yang tidak hanya berbasis pasar, tetapi juga berpihak pada kelompok rentan. Dalam konteks ini, sistem proteksi terhadap petani salak harus menjadi kebijakan desa yang tidak sekadar responsif terhadap bencana atau krisis, tetapi juga bersifat preventif, strategis, dan berkelanjutan.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum harus diberikan dengan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dipengaruhi oleh orang lain perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sementara itu menurut C.S.T. Kansil, Perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus disediakan oleh petugas penegak hukum untuk menyediakannya rasa aman baik dalam hal hambatan maupun dalam kaitannya dengan berbagai ancaman. Dari semua pihak. Perlindungan hukum preventif sangat penting untuk langkah-langkah negara. Berdasarkan kebebasan perilaku berdasarkan perlindungan Undang -undang pencegahan pemerintah didorong untuk sadar dalam mengambil keputusan.

Secara umum, proteksi terhadap petani dapat dibedakan menjadi dua pendekatan besar, yaitu proteksi preventif dan proteksi represif. Proteksi preventif merupakan upaya antisipatif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian pada petani. Sedangkan proteksi represif merupakan langkah responsif yang dilakukan setelah petani mengalami kerugian atau krisis, seperti gagal panen atau bencana alam.

Dalam perspektif kesejahteraan sosial, James Midgley (1997) menyebut perlindungan sosial sebagai bagian dari kebijakan publik yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, serta memberikan jaminan dasar terhadap kebutuhan hidup. Konsep ini menekankan peran negara dalam menjamin warga negara, terutama kelompok rentan seperti petani, dari tekanan ekonomi yang tidak dapat mereka kendalikan sendiri. Perlindungan sosial termasuk di dalamnya jaminan terhadap pendapatan minimum, akses terhadap pelayanan dasar, dan skema asuransi sosial.

John Rawls dalam teorinya mengenai keadilan sosial menyatakan bahwa perlindungan harus difokuskan pada kelompok paling lemah dalam masyarakat. Negara, menurut Rawls, berkewajiban menciptakan sistem sosial yang adil, di mana distribusi sumber daya dan akses terhadap kesempatan hidup dilakukan secara setara. Dalam konteks pertanian, ini berarti negara harus berpihak pada petani kecil yang sering terpinggirkan oleh sistem ekonomi pasar bebas.

Dalam pendekatan preventif, pemerintah desa dapat menjalankan perannya melalui penguatan kapasitas petani. Menurut Chambers dan Conway (1992) dalam konsep *sustainable rural livelihoods*, ketahanan petani hanya dapat dicapai jika mereka memiliki akses terhadap aset produksi, informasi, serta kelembagaan lokal yang mendukung. Oleh karena itu, pelatihan budidaya yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim menjadi penting. Di sisi lain, pemerintah desa dapat memperkuat kelompok tani dan koperasi sebagai lembaga ekonomi dan sosial petani. Dengan lembaga yang kuat, petani memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam pasar dan bisa saling melindungi dalam kondisi darurat. Pendekatan preventif juga bisa diwujudkan dalam bentuk diversifikasi produk. Dalam penelitian oleh Puspaningrum dkk. (2024), pelatihan pembuatan kombucha salak di Desa Sibetan, Bali, menjadi strategi untuk mengantisipasi anjloknya harga salak segar. Produk olahan seperti ini memperluas pasar dan meningkatkan nilai tambah hasil panen. Hal ini membuktikan bahwa inovasi produk adalah bagian dari proteksi ekonomi yang sangat efektif jika dikawal oleh pemerintah desa.

Berdasarkan pemahaman mengenai pengertian di atas maka dapat di simpulkan bahwa perlindungan terhadap petani dimaknai sebagai serangkaian tindakan, kebijakan, maupun perangkat hukum yang ditujukan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan pekerjaan petani dari berbagai bentuk kerugian yang bersifat struktural, alamiah, maupun sistemik. Petani sebagai pelaku utama produksi pangan

memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan pangan nasional, namun sering kali mereka menghadapi berbagai risiko, seperti perubahan iklim, gagal panen, fluktuasi harga pasar, hingga konflik lahan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap petani tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga tanggung jawab konstitusional negara.

Perlindungan terhadap petani dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, perlindungan dari sisi ekonomi pasar, khususnya dalam relasi antara petani dan pengepul. Banyak petani yang mengalami kerugian karena harga hasil panen ditentukan secara sepihak oleh pengepul atau tengkulak, tanpa memperhatikan biaya produksi dan keuntungan yang layak. Ketimpangan kekuatan tawar ini menyebabkan petani terus-menerus berada dalam siklus ketergantungan dan kerugian. Untuk itu, perlu ada regulasi harga dasar serta penguatan kelembagaan petani, seperti koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dapat memperkuat posisi tawar petani dalam rantai distribusi hasil pertanian.

Kedua, bentuk perlindungan dilakukan melalui skema asuransi pertanian seperti Asuransi Usaha Tani (AUT). AUT merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi beban kerugian petani akibat gagal panen yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti cuaca ekstrem, hama, atau bencana alam. Program ini sejatinya memberikan rasa aman bagi petani dalam berproduksi, karena mereka tetap memiliki jaminan pendapatan ketika menghadapi risiko tersebut. Namun dalam praktiknya, banyak petani belum memahami atau bahkan belum mengetahui cara kerja asuransi tersebut, sehingga partisipasi mereka

masih rendah. Di sinilah letak pentingnya pendekatan edukatif, melalui penyuluhan, pendampingan, dan simplifikasi birokrasi agar program perlindungan seperti AUTP benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani.

Ketiga, dalam kerangka regulasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani hadir sebagai bentuk perlindungan hukum yang komprehensif. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi negara untuk melindungi petani dari berbagai kerentanan, seperti ketidakpastian harga, kelangkaan sarana produksi, dan konversi lahan pertanian. Dalam undang-undang tersebut, perlindungan terhadap petani tidak hanya dimaknai sebagai upaya untuk menghindari kerugian, tetapi juga mencakup pemberdayaan melalui pelatihan, kemudahan akses modal, penguatan kelembagaan, dan fasilitasi pemasaran hasil pertanian. Dengan demikian, perlindungan dan pemberdayaan berjalan secara beriringan untuk menciptakan petani yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

Perlindungan terhadap petani harus dilihat sebagai sebuah ekosistem kebijakan yang melibatkan berbagai sektor: hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan menghindarkan petani dari kerugian, tetapi juga mendorong transformasi pertanian menjadi sektor yang layak secara ekonomi dan berkelanjutan secara sosial. Negara tidak hanya hadir sebagai pembuat regulasi, melainkan juga sebagai fasilitator, pelayan, dan pelindung

aktif bagi petani, agar mereka dapat menjalankan perannya dengan aman, bermartabat, dan produktif.

4. Petani

Petani salak merupakan aktor utama dalam sistem pertanian hortikultura yang memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi lokal di berbagai wilayah, terutama di Kabupaten Sleman dan Magelang. Mereka menggantungkan kehidupan pada hasil panen salak, baik dalam bentuk buah segar maupun olahan. Namun, keberlangsungan usaha tani salak tidak selalu stabil. Petani menghadapi beragam tantangan, mulai dari fluktuasi harga pasar, keterbatasan akses terhadap pupuk dan bibit berkualitas, hingga ancaman serangan hama seperti lalat buah (*Bactrocera spp.*) yang dapat menyebabkan kerusakan panen hingga mencapai 70%. Selain itu, faktor cuaca dan bencana alam juga menjadi penyebab kerentanan ekonomi petani salak, seperti yang terjadi pasca erupsi Gunung Merapi yang merusak ribuan pohon salak dan menyebabkan penurunan produksi secara drastis.

Dalam perspektif keberlanjutan, Chambers dan Conway (1992) menjelaskan bahwa petani kecil seperti petani salak memerlukan lima bentuk aset dasar untuk mencapai sustainable livelihoods, yaitu aset manusia, alam, finansial, fisik, dan sosial. Ketika petani tidak memiliki dukungan atas kelima aset tersebut, maka tingkat kerentanannya akan semakin tinggi. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ellis (2000) yang

menekankan pentingnya kelembagaan lokal dalam membantu petani bertahan menghadapi dinamika pasar dan kondisi alam.

Secara sosial, petani salak juga masih berada dalam posisi lemah dalam rantai tata niaga. Ketergantungan mereka pada tengkulak atau pengepul sering kali menyebabkan harga jual di tingkat petani tidak sebanding dengan nilai di pasar akhir. Hal ini diperparah oleh kurangnya sistem perlindungan harga atau lembaga pemasaran desa yang bisa menjamin stabilitas harga. Oleh karena itu, dalam kerangka konseptual ini, petani salak tidak hanya diposisikan sebagai pelaku produksi, tetapi juga sebagai subjek yang rentan dan membutuhkan perlindungan sistemik dari pemerintah desa.

Beberapa penelitian lapangan menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya peningkatan pendapatan melalui olahan salak (seperti sirup, dodol, atau kombucha), namun hal ini tidak secara otomatis meningkatkan perlindungan petani jika tidak disertai kelembagaan yang kuat. Dengan demikian, penting bagi struktur desa untuk tidak hanya mendorong inovasi produk, tetapi juga memastikan bahwa petani sebagai pelaku utama mendapatkan perlindungan sosial, ekonomi, dan kelembagaan secara komprehensif.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2016:15), metode kualitatif merupakan pendekatan

penelitian yang berpijak pada paradigma postpositivistik. Metode ini dipilih untuk menggali secara mendalam realitas sosial pada objek penelitian yang berlangsung secara alamiah, tanpa adanya manipulasi terhadap kondisi lapangan. Pengumpulan data dalam pendekatan ini dilakukan melalui berbagai teknik, seperti wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi, yang kemudian divalidasi menggunakan teknik triangulasi atau penggabungan berbagai sumber data. Proses analisis data bersifat induktif, dengan mengedepankan pola dan makna yang muncul dari data yang dikumpulkan, bukan berdasarkan hipotesis yang sudah ditentukan sebelumnya.

Lebih lanjut, Usman (2009:129-130) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah proses ilmiah untuk menggambarkan serta memaparkan situasi atau fenomena yang sedang berlangsung dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini mengarah pada upaya mendalami dan memahami suatu peristiwa melalui sudut pandang para narasumber. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, makna dari setiap tindakan dan pengalaman individu dianalisis dengan mempertimbangkan latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya mereka. Proses penelitian ini melibatkan beberapa tahapan penting, yakni reduksi data untuk menyaring informasi relevan, penyajian data secara sistematis, penarikan kesimpulan yang logis, serta validasi temuan guna memastikan keabsahan data yang diperoleh.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada

pengumpulan informasi yang faktual dari realitas yang terjadi di lapangan, kemudian menggambarkannya secara sistematis dan mendalam. Data yang diperoleh diinterpretasikan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan pengalaman subjek penelitian, lalu disusun menjadi simpulan berdasarkan hasil pengamatan empiris. Metode ini memberikan pemahaman komprehensif terhadap fenomena yang diteliti dan menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi yang relevan dan aplikatif.

2. Unit Analisis Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kumpulan yang dapat berupa individu, organisasi, atau barang yang menjadi fokus penelitian. Menurut Sugiyono (2014:20), penelitian biasanya berpusat pada objek yang memiliki ciri-ciri tertentu, seperti sifat, karakter, atau nilai yang melekat pada individu, objek, atau aktivitas yang bervariasi, yang kemudian dianalisis dan dijadikan kesimpulan. Suprianti (2012:38) menjelaskan bahwa objek penelitian merujuk pada variabel yang menjadi fokus kajian dan dianalisis oleh peneliti di lokasi yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, peneliti perlu menentukan dan memilih satu variabel utama yang akan dikaji sebelum melakukan penelitian pada objek yang telah dipilih. Dalam konteks ini, objek penelitian yang dimaksud adalah: Peran Pemerintah Kalurahan Gilikerto Dan Masyarakat

Gilikerto yang berkerja sebagai Petani Salak.

Informan Dalam penelitian ini berjumlah enam orang yang terdiri dari Pemerintah Kalurahan Girikerto dan Masyarakat Petani Salak.

Nama-Nama Informan Penelitian

Tabel 1. 1 Nama-Nama Informan Penelitian

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN	PENDIDIKAN
1	Endang	52	Ketua Kelompok Tani	SMA
2	Sukman	59	Petani	SMA
3	Skimirin	34	Kaur Pangripto	SMA
4	Krisna	32	Carik	S1
5	Nurahman	52	Ulu-ulu	SMP
6	Ampit			

Sumber: Dokumen Lapangan Penelit 2025.

b. Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (2006:145), subjek penelitian merupakan objek utama yang menjadi pusat perhatian dalam sebuah penelitian. Sedangkan, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2016:218). Dalam penelitian ini, subjek yang akan dijadikan objek kajian adalah: Pemerintah Desa, Pemangku Wilayah, Petani salak.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Creswell (dalam Sugiyono, 2017), observasi merupakan suatu proses di mana peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk mengamati aktivitas individu di lokasi penelitian. Metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap objek, kondisi, situasi, proses, maupun perilaku tertentu. Data dikumpulkan melalui penginderaan peneliti dan didukung oleh pencatatan yang sistematis terhadap berbagai gejala atau fenomena yang diamati. Observasi umumnya digunakan ketika informasi mengenai permasalahan yang diteliti masih terbatas. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut, serta menemukan petunjuk yang dapat mengarah pada solusi atau alternatif pemecahan masalah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi, di mana peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk mengamati aktivitas dan tindakan yang berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap petani salak di Kalurahan Girikerto. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai bentuk dukungan, kebijakan, serta peran aktor lokal, termasuk pemerintah kalurahan dan pihak eksternal, dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian salak di wilayah tersebut.

Melalui pengamatan langsung di lapangan, peneliti

menemukan bahwa hingga saat ini belum terdapat regulasi atau kebijakan formal dari Pemerintah Kalurahan Girikerto yang secara khusus mengatur atau melindungi petani salak. Perlindungan yang ada masih bersifat informal dan belum terlembaga dalam bentuk peraturan desa atau kebijakan lokal yang mengikat. Hal ini membuat posisi petani salak tetap rentan, terutama dalam menghadapi tantangan struktural seperti fluktuasi harga, akses pasar, serta keterbatasan sarana produksi.

Selain itu, bantuan dan dukungan yang bersifat teknis maupun material dari pemerintah kalurahan juga belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan spesifik para petani. Beberapa petani mengungkapkan bahwa mereka jarang menerima pelatihan atau pendampingan yang terarah dari pihak kalurahan. Justru, dukungan yang lebih terlihat datang dari Dinas Pertanian Kabupaten, yang dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan intervensi melalui berbagai program penguatan kapasitas kelompok tani salak.

Bentuk dukungan dari Dinas Pertanian ini antara lain berupa pembangunan gazebo sebagai tempat pertemuan kelompok tani, serta pos-pos strategis yang digunakan sebagai pusat informasi dan koordinasi kegiatan pertanian. Selain itu, dinas juga memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan teknis budidaya salak, pengendalian hama terpadu, serta penyuluhan pertanian berkelanjutan. Bantuan tersebut bertujuan untuk

memperkuat kelembagaan kelompok tani serta meningkatkan efisiensi dan hasil produksi salak sebagai komoditas unggulan daerah.

Meskipun demikian, dukungan tersebut masih lebih berfokus pada aspek infrastruktur dan pelatihan umum, dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan yang lebih mendalam seperti modernisasi alat produksi atau akses pembiayaan usaha tani. Oleh karena itu, pengaruhnya terhadap peningkatan kapasitas produksi maupun kemandirian ekonomi petani masih terbatas.

Dari sisi alat dan sarana produksi, sebagian besar petani salak masih menggunakan peralatan sederhana dan teknik manual. Belum terlihat adanya program dari pemerintah kalurahan yang fokus pada modernisasi alat pertanian atau peningkatan efisiensi produksi. Hal ini berdampak pada terbatasnya produktivitas serta daya saing produk salak Girikerto di pasar yang lebih luas.

Dalam aspek pemasaran, tantangan yang dihadapi para petani salak juga belum terjawab oleh intervensi kebijakan lokal. Ketergantungan terhadap tengkulak masih tinggi, sementara upaya untuk mengakses pasar baru dan mengembangkan sistem penjualan digital belum didukung secara sistematis. Branding dan pengemasan produk juga belum menjadi perhatian serius dalam kebijakan pengembangan ekonomi lokal, sehingga produk salak

dari Girikerto masih kurang kompetitif dibandingkan dengan produk serupa dari daerah lain.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang dilakukan untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui kegiatan tanya jawab, dengan tujuan membangun pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2017). Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan kombinasi dua jenis wawancara, yakni wawancara mendalam (in-depth interview) dan wawancara terarah (structured interview) sebagaimana dijelaskan oleh Kriyantono (2020).

Wawancara mendalam dilakukan secara fleksibel, dimana peneliti memberikan ruang kebebasan kepada informan untuk menjawab dan menjelaskan tanpa terikat pada daftar pertanyaan yang kaku. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi informasi yang lebih luas sesuai dengan pengalaman dan perspektif informan. Sebaliknya, wawancara terarah dilaksanakan dengan menggunakan panduan atau daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti, sehingga prosesnya lebih terstruktur dan fokus pada isu-isu yang relevan dengan penelitian.

Melalui kedua pendekatan ini, peneliti memperoleh data dan informasi langsung dari sumber di lapangan yang berkaitan

dengan permasalahan yang sedang dikaji. Proses tanya jawab ini menjadi sarana penting dalam menggali pemahaman yang lebih komprehensif dari para informan, baik dari sisi kebijakan maupun pengalaman langsung.

Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan isu yang diteliti, yaitu pemerintah Kalurahan Girikerto dan para petani salak sebagai pelaku utama dalam sektor pertanian lokal. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan relevan sebagai bahan utama dalam analisis penelitian, berdasarkan sampel informan yang telah ditentukan melalui teknik purposive sampling.

Tahapan wawancara diawali dengan kunjungan peneliti ke kantor Kalurahan Girikerto untuk memperoleh informasi awal mengenai bentuk perlindungan dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah kalurahan kepada para petani salak. Wawancara pertama dilakukan dengan Lurah Kalurahan Girikerto yang memberikan gambaran umum mengenai kebijakan desa terkait sektor pertanian, termasuk bentuk bantuan, intervensi, serta arah kebijakan yang telah diambil untuk mendukung petani salak.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Carik Kalurahan Girikerto guna menggali informasi lebih detail mengenai aspek administratif dan dokumentasi program-program desa yang berkaitan dengan pertanian salak. Informasi ini

mencakup data kelompok tani, alokasi anggaran, serta bentuk sinergi dengan pihak luar, seperti dinas pertanian.

Wawancara kemudian dilanjutkan dengan Ketua Kelompok Tani yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kegiatan pertanian di tingkat lapangan. Dari wawancara ini, peneliti memperoleh informasi terkait dinamika kelompok tani, strategi budidaya salak, pengelolaan hasil panen, serta kendala teknis yang dihadapi oleh para petani dalam keseharian mereka.

Setelah itu, peneliti mewawancarai sejumlah petani salak yang telah dipilih sebagai informan utama. Pemilihan dilakukan secara purposive, berdasarkan kriteria tertentu seperti pengalaman bertani, keterlibatan dalam kelompok tani, serta akses terhadap program bantuan pemerintah. Wawancara dengan petani ini mengungkap banyak hal terkait praktik budidaya salak, tantangan ekonomi, hambatan pemasaran, serta sejauh mana mereka merasakan perlindungan atau manfaat dari kebijakan pemerintah kalurahan maupun dari dinas terkait.

Melalui wawancara dengan para petani, peneliti juga menggali informasi mengenai bentuk dukungan yang telah mereka terima dari Dinas Pertanian, seperti pelatihan, penyuluhan, maupun bantuan infrastruktur pertanian. Beberapa petani menyampaikan bahwa sebagian besar bantuan justru lebih sering datang dari dinas kabupaten, bukan dari pemerintah kalurahan secara langsung.

Seluruh proses wawancara dilakukan secara langsung di lapangan, menggunakan pendekatan partisipatif dan komunikasi terbuka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi pengambil kebijakan di tingkat desa maupun dari pelaku utama di sektor pertanian salak. Informasi yang diperoleh dari wawancara ini menjadi bagian penting dalam mengkaji efektivitas dan keberlanjutan bentuk perlindungan yang diberikan kepada petani salak di Kalurahan Girikerto.

c. Dokumentasi

Lexy J. Moleong (2005:216) menjelaskan bahwa teknik dokumentasi meliputi pengumpulan data dari dokumen tertulis maupun rekaman yang ada di lokasi penelitian. Rekaman tersebut digunakan untuk memperkuat pertanyaan penelitian yang dibuat oleh peneliti, baik dari individu maupun institusi.

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data yang digunakan peneliti sebagai bukti otentik, dengan memanfaatkan berbagai alat bantu yang tersedia untuk mengumpulkan informasi secara memadai. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa data tertulis, seperti profil umum Kalurahan, catatan sejarah, kebijakan yang berlaku, maupun dokumen visual seperti foto-foto kegiatan atau kondisi lapangan. Data hasil dokumentasi ini kemudian dianalisis dan digunakan untuk melengkapi temuan yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara

(Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi sebagai salah satu bentuk bukti pendukung yang memperkuat temuan maupun hasil penelitian. Dokumentasi yang dikumpulkan selama proses penelitian meliputi catatan lapangan, hasil wawancara, serta data observasi yang berfungsi sebagai bukti sah dan dapat digunakan oleh peneliti maupun pembaca untuk memverifikasi keabsahan data.

Selama proses pengumpulan data, peneliti juga menghimpun berbagai dokumen pendukung guna melengkapi informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Salah satu dokumen utama yang dijadikan referensi adalah profil Kalurahan Girikerto, yang memuat informasi umum mengenai wilayah administratif, struktur pemerintahan, serta kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang ada di Kalurahan Girikerto.

Profil ini memberikan gambaran kontekstual yang penting untuk memahami latar belakang kebijakan pemerintah kalurahan, potensi pertanian salak, serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat, khususnya para petani salak. Informasi dalam dokumen ini turut membantu peneliti dalam menyusun pendekatan analisis yang sesuai dengan kondisi lapangan.

Selain dokumen tertulis, peneliti juga mendokumentasikan kegiatan wawancara dalam bentuk foto, baik dengan pihak pemerintah kalurahan maupun dengan petani

salak sebagai informan utama. Dokumentasi visual ini disertakan dalam laporan penelitian sebagai lampiran, guna memperkuat validitas data dan memberikan bukti nyata atas interaksi yang dilakukan selama pengumpulan data.

Secara keseluruhan, dokumen dan dokumentasi yang dikumpulkan menjadi bagian penting dalam mendukung validitas dan reliabilitas penelitian, sekaligus memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dinamika perlindungan pemerintah kalurahan terhadap petani salak di Kalurahan Girikerto.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik analisis data deskriptif kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2007). Data yang diperoleh, baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan, dianalisis dengan cara diungkapkan kembali dalam bentuk narasi atau kalimat, kemudian diklasifikasikan dan dihubungkan antar aspek yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diolah secara sistematis melalui tahapan yang saling berkaitan. Proses analisis dimulai sejak data dikumpulkan di lapangan dan berlangsung terus-menerus hingga penulisan laporan penelitian selesai. Peneliti berupaya menggambarkan

kondisi nyata pelayanan administrasi pertanahan di Kalurahan Guwosari berdasarkan data empiris yang ditemukan, bukan berdasarkan asumsi atau dugaan semata.

Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian diolah melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017), analisis data merupakan proses memilah antara data yang relevan dan yang kurang penting, serta mengorganisasi dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis. Tahapan ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori-kategori, pemecahan data menjadi unit-unit terkecil, penyusunan sintesis, pengidentifikasi pola hubungan antar kategori, serta penarikan kesimpulan, sehingga hasil analisis menjadi mudah dipahami oleh peneliti maupun pihak lain.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data secara sistematis untuk menggali informasi terkait bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan Girikerto terhadap petani salak, dengan tujuan mengetahui sejauh mana peran pemerintah kalurahan dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian salak. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung, wawancara, dan studi dokumentasi.

Tahap pertama, peneliti melakukan observasi langsung di lapangan, dengan cara mengamati kondisi para petani salak, aktivitas pertanian, serta interaksi antara pemerintah kalurahan dan kelompok tani. Peneliti mencatat berbagai temuan yang berkaitan dengan bentuk dukungan nyata yang diberikan, seperti bantuan sarana produksi, pendampingan teknis, serta kondisi fasilitas pertanian yang tersedia di Kalurahan Girikerto.

Tahap kedua, peneliti menggunakan metode wawancara terhadap informan yang terdiri dari pihak Pemerintah Kalurahan Girikerto, seperti Lurah, Carik, serta Ketua Kelompok Tani, dan juga beberapa petani salak yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan semi-terstruktur, untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi yang lebih mendalam, namun tetap berfokus pada topik utama, yaitu sejauh mana perlindungan dan perhatian pemerintah kalurahan dirasakan oleh petani salak.

Tahap ketiga, peneliti melakukan studi dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan, seperti profil Kalurahan Girikerto, program kerja pemerintah desa, foto kegiatan pertanian, dokumentasi pembangunan fasilitas pendukung seperti gazebo atau pos kelompok tani, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan

bantuan dari Dinas Pertanian. Dokumentasi ini digunakan untuk mencocokkan antara praktik di lapangan dan bentuk dukungan formal yang tercatat secara administratif.

Selama proses pengumpulan data, peneliti juga menghadapi beberapa kendala teknis, terutama dalam menjadwalkan wawancara dengan beberapa informan, karena sebagian dari mereka memiliki aktivitas pertanian yang padat, terutama saat musim panen atau perawatan kebun. Untuk mengatasi hal ini, peneliti menyesuaikan waktu kunjungan, seperti datang pada sore hari atau saat para petani beristirahat, agar proses pengumpulan data tetap berjalan secara optimal.

Melalui kombinasi ketiga metode tersebut, peneliti berhasil menghimpun data yang kaya dan beragam, yang kemudian dijadikan dasar dalam menganalisis bentuk perlindungan pemerintah kalurahan terhadap petani salak di Kalurahan Girikerto, baik dari aspek kebijakan, dukungan teknis, maupun kondisi sosial ekonomi yang menyertainya.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum, menyaring, dan memfokuskan data pada aspek-aspek penting yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tahapan ini membutuhkan ketelitian, kepekaan, dan pemahaman yang luas (Sugiyono, 2017).

Reduksi data merupakan tahap awal dalam proses

analisis data kualitatif yang dilakukan setelah seluruh data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi terkumpul. Pada tahap ini, peneliti mulai menyederhanakan, memilah, dan memfokuskan data yang relevan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian. Data yang tidak sesuai dengan topik utama, seperti informasi yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan administrasi pertanahan atau tidak mendukung analisis transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, dieliminasi untuk menjaga fokus penelitian tetap terarah.

Selama proses reduksi, peneliti mengelompokkan data berdasarkan kategori tematik, seperti jenis pelayanan administrasi pertanahan, bentuk partisipasi masyarakat, bentuk akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Misalnya, dari wawancara dengan warga yang pernah mengurus SKT, hanya kutipan yang menunjukkan pengalaman pelayanan, hambatan, atau tanggapan terhadap pelayanan yang dipilih. Sementara dari observasi, hanya catatan lapangan yang menunjukkan alur pelayanan, kondisi ruang pelayanan, dan interaksi antara aparat dan warga yang digunakan.

Melalui reduksi data ini, peneliti dapat menyusun data secara lebih terstruktur dan fokus, yang nantinya akan memudahkan dalam proses penyajian dan penarikan

kesimpulan. Reduksi juga membantu menghindari pembahasan yang melebar dan menjaga agar seluruh hasil analisis tetap berada dalam koridor tujuan penelitian. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan, artinya saat data baru masuk, peneliti terus melakukan seleksi dan klasifikasi agar hanya informasi yang bermakna dan mendukung tujuan penelitian yang dianalisis lebih lanjut. Dengan demikian, reduksi data menjadi langkah penting untuk membangun kejelasan dan kedalaman dalam interpretasi data kualitatif.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menampilkan hasil reduksi data dalam laporan secara sistematis sehingga mudah dipahami, baik secara keseluruhan maupun pada bagian-bagiannya, dengan tetap menjaga konteks sebagai satu kesatuan (Sugiyono, 2018)

Setelah data dikumpulkan dan direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikannya secara terstruktur dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, data disusun berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan permasalahan di Kalurahan Girikerto, yaitu bentuk dukungan pemerintah kalurahan terhadap petani salak, kendala yang dihadapi petani dalam produksi dan pemasaran, serta peran aktor lokal dan pihak eksternal dalam menjaga keberlanjutan pertanian salak.

Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan kutipan langsung dari narasumber, deskripsi hasil observasi lapangan, serta dokumen pendukung seperti profil kalurahan dan kebijakan terkait. Pendekatan tematik ini memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola dan hubungan antar isu yang muncul di lapangan.

Untuk menjaga kejelasan dan konsistensi, setiap tema yang disajikan disertai dengan interpretasi peneliti berdasarkan teori pertanian berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Penyajian data ini juga bertujuan memperlihatkan keterkaitan antara temuan empiris dan kerangka teori terkait pengelolaan pertanian, pemberdayaan petani, serta peran pemerintah desa. Dengan demikian, pembaca dapat memahami bagaimana data lapangan mendukung atau memberikan perspektif baru terhadap teori-teori tersebut. Penyajian data yang sistematis dan tematik ini menjadi dasar penting untuk analisis mendalam serta penyusunan rekomendasi yang tepat dan aplikatif guna meningkatkan kesejahteraan petani salak di Kalurahan Girikerto.

d. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2015:83), triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggabungkan berbagai metode dan sumber data yang telah diperoleh, guna meningkatkan keakuratan dan validitas hasil penelitian.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari proses wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, yang sebelumnya telah melalui tahapan reduksi dan penyajian data. Kesimpulan ditarik berdasarkan analisis tematik terhadap dinamika perlindungan dan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan Girikerto kepada para petani salak

Kesimpulan dirumuskan dengan mempertimbangkan keterkaitan antar-temuan data serta konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang memengaruhi praktik pertanian salak di tingkat lokal. Dalam hal ini, penarikan kesimpulan tidak hanya bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian, tetapi juga untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana peran aktif pemerintah kalurahan dalam memberikan perlindungan, bantuan, serta pembinaan yang berkelanjutan kepada petani salak.

Melalui pendekatan tersebut, kesimpulan yang dihasilkan bukan bersifat generalisasi, melainkan merupakan interpretasi mendalam terhadap realitas sosial yang khas di Kalurahan Girikerto. Kesimpulan ini menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dan saran praktis bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat memperkuat perlindungan serta memberdayakan petani salak secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

BAB II

DESKRIPSI PETANI SALAK DI KALURAHAN GILIKKERTO

A. Sejarah Kalurahan

Kalurahan Girikerto merupakan salah satu wilayah administrasi yang terletak di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada masa awal terbentuknya, wilayah ini merupakan gabungan dari empat kalurahan, yaitu Kalurahan Tanggung, Kalurahan Ngandong, Kalurahan Nangsri Lor, dan Kalurahan Kemirikebo. Keempat wilayah tersebut dulunya berdiri secara mandiri dengan struktur pemerintahan masing-masing.

Seiring berjalannya waktu dan dalam semangat penyederhanaan serta efisiensi tata kelola pemerintahan desa, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1946 mengeluarkan maklumat tentang pengaturan kembali pemerintahan kalurahan. Berdasarkan maklumat tersebut, keempat kalurahan yang ada kemudian digabung menjadi satu kesatuan wilayah administratif yang diberi nama Kalurahan Girikerto. Penetapan resmi penggabungan ini tertuang dalam Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kelurahan.

Sejak berdirinya hingga saat ini, roda pemerintahan Kalurahan Girikerto telah dipimpin oleh sejumlah tokoh dengan latar belakang dan gaya kepemimpinan yang beragam. Masing-masing pemimpin memberikan kontribusi penting dalam mengawal pembangunan dan pelayanan kepada

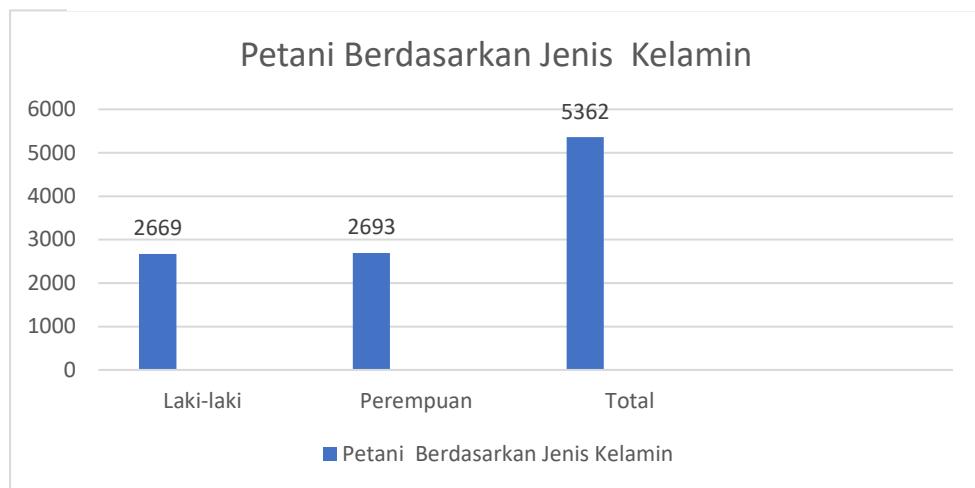
masyarakat sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zamannya. Adapun daftar nama-nama Lurah yang pernah menjabat adalah sebagai berikut:

Nama Lurah Masa Jabatan

1. M. Ng Radiyo Hadisugondo 1948 – 1986
2. Ibnu Pratiknyo 1989 – 1998
3. Soeharto, B.A. 1999 – 2013
4. H. Sumaryanta, S.H. 2013 – 2019
5. H. Sudibya, S.Pd. 2020 – sekarang

Perjalanan panjang pemerintahan Kalurahan Girikerto menunjukkan adanya proses adaptasi yang berkesinambungan. Dari masa ke masa, sistem pemerintahan semakin menunjukkan perbaikan dalam hal penataan administrasi, pelayanan publik, dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Transformasi tersebut dilakukan dengan menyesuaikan dinamika masyarakat yang semakin kompleks serta kemajuan teknologi yang turut memengaruhi tata kelola pemerintahan desa. Dengan komitmen untuk terus berbenah dan terbuka terhadap perubahan, Kalurahan Girikerto mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Kebijakan dan regulasi yang diterapkan pun disusun dengan prinsip akuntabilitas, sehingga mendukung terciptanya pemerintahan yang tertib dan berdaya saing di tengah era modernisasi saat ini.

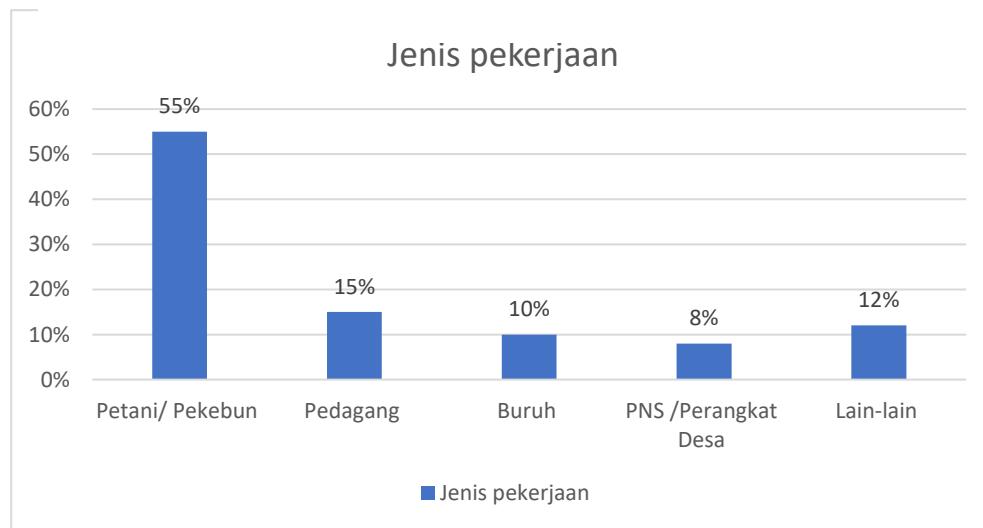
Gambar 2. 1 Jumlah Petani Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Profil Kalurahan 2024

Tabel ini menunjukkan komposisi penduduk Kalurahan Girikerto berdasarkan jenis kelamin. Dari total 5.362 jiwa, penduduk laki-laki berjumlah 2.669 orang dan perempuan sebanyak 2.693 orang. Komposisi yang hampir seimbang ini mencerminkan stabilitas struktur demografi yang dapat mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat secara merata.

Gambar 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan



Sumber: Profil Kalurahan 2024

Sebagian besar penduduk Kalurahan Girikerto bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, dengan persentase sebesar 55%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, khususnya budidaya salak pondoh, merupakan sumber penghidupan utama. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang (15%), buruh (10%), aparatur desa atau PNS (8%), dan pekerjaan lainnya (12%). Keberagaman ini menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang relatif beragam meskipun masih didominasi oleh sektor primer.

Tabel 2. 1 Jenis Lahan

Jenis Lahan	Luas (Hektar)	Keterangan
Perkebunan Salak	125 ha	Terbesar di padukuhan Ngandong, Kemiri, Jati
Lahan hortikultura campuran	± 30 ha	Cabai, tomat, pisang, papaya
Total lahan Perkebunan	± 155 ha	Perkebunan salak + tanaman campuran

Sumber: Profil Kalurahan 2024

Tabel ini menggambarkan luas lahan yang digunakan untuk perkebunan di Kalurahan Girikerto. Lahan salak pondoh mendominasi dengan luas sekitar 125 hektar. Selain itu, terdapat ±30 hektar lahan hortikultura campuran yang ditanami cabai, tomat, pisang, dan pepaya. Total luas lahan perkebunan diperkirakan mencapai 155 hektar. Dominasi lahan salak ini memperkuat identitas Kalurahan Girikerto sebagai sentra produksi salak pondoh di Sleman.

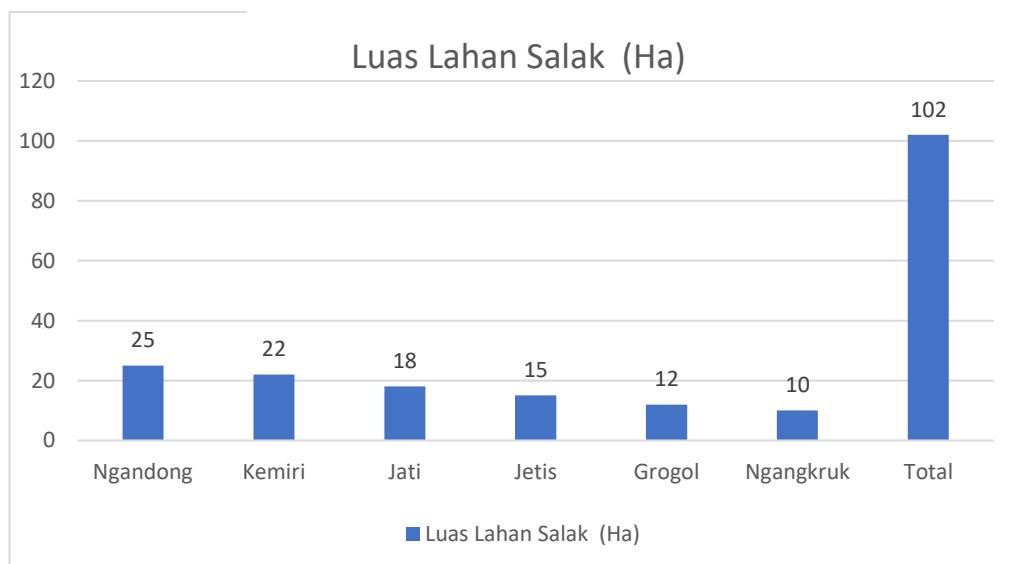
Tabel 2. 2 Jenis Tanaman

Jenis Tanaman	Skala Budidaya	Keterangan
Salak pondoh	Utama	Komoditas unggulan Kalurahan Girikerto
Pisang	Sampingan	Sebagai tanaman sela atau konsumsi harian
Pepaya	Sampingan	Tumbuh liar atau ditanam di pekarangan
Jambu biji	Kecil	Umumnya untuk konsumsi keluarga
Kelapa	Kecil	Tumbuh alami di sebagian pekarangan

Sumber: Profil Kalurahan 2024

Jenis tanaman yang dibudidayakan di Kalurahan Girikerto bervariasi, namun salak pondoh merupakan komoditas utama dan menjadi ikon desa. Tanaman lain seperti pisang dan pepaya biasanya ditanam sebagai tanaman sela, sementara jambu biji dan kelapa tumbuh dalam skala kecil, umumnya di pekarangan rumah. Diversifikasi tanaman ini membantu petani memenuhi kebutuhan harian dan mengurangi risiko kegagalan panen tunggal.

Gambar 2. 3 Luas Lahan Salak



Sumber: Profil Kalurahan 2024

Diagram diatas menggambarkan distribusi luas lahan salak pondoh di enam padukuhan yang menjadi sentra produksi salak di Kalurahan Girikerto. Padukuhan Ngandong tercatat memiliki lahan terluas yaitu 25 hektar, menunjukkan potensi produksi yang tinggi. Disusul oleh Kemiri (22 ha) dan Jati (18 ha) yang juga berperan penting dalam produksi salak. Sementara itu, wilayah seperti Grogol dan Ngangkruk mengalami penyusutan lahan karena beberapa faktor, termasuk alih fungsi lahan ke pemukiman atau komoditas lain. Total luas lahan salak mencapai sekitar 102 hektar, yang menjadi tulang punggung kegiatan perkebunan desa ini.

Gambar 2. 4 Produksi Salak

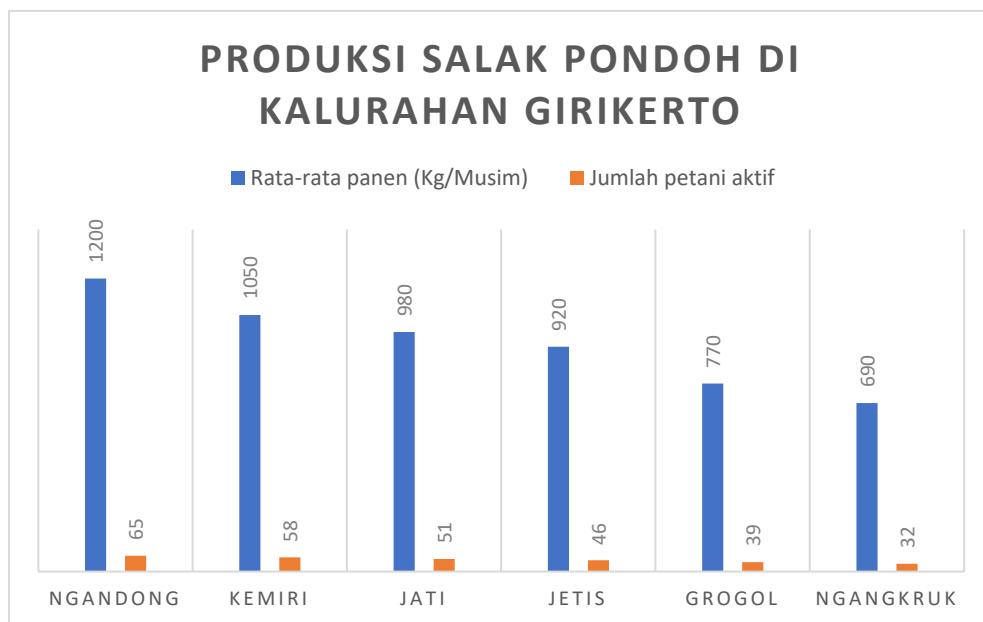


Sumber: Profil Kalurahan 2024

Diagram ini mencatat total produksi salak pondoh di Kalurahan Girikerto dalam satuan ton selama lima tahun terakhir. Produksi mengalami fluktuasi karena pengaruh kondisi cuaca, harga pasar, dan kegiatan budidaya. Tahun 2020 menunjukkan penurunan produksi akibat pandemi COVID-19 yang menurunkan daya serap pasar. Namun, produksi meningkat kembali

pada 2021 dan mencapai puncaknya di tahun 2022 (940 ton). Tahun 2023 sedikit menurun karena faktor cuaca dan hama. Perkiraan tahun 2024 menunjukkan angka sekitar 880 ton, berdasarkan laporan pertengahan tahun dari kelompok tani.

Gambar 2. 5 Produksi Salak Pondoh Di Kalurahan Girikerto

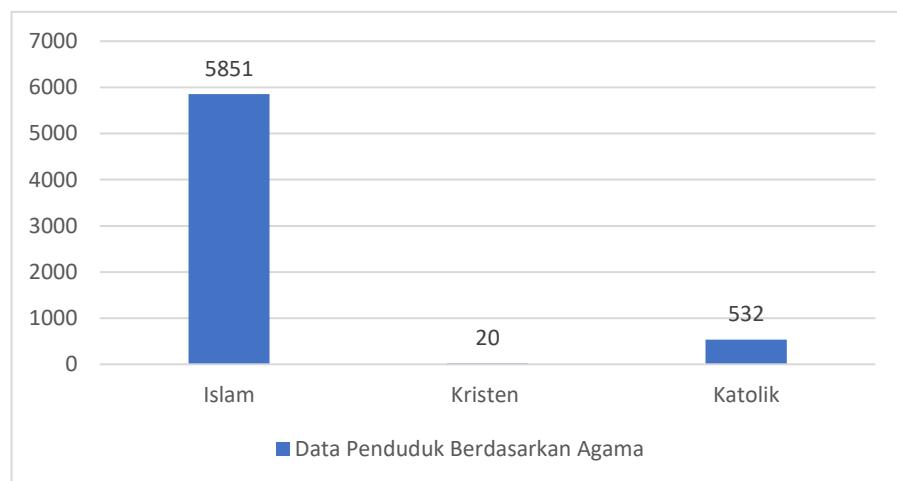


Sumber: Profil Kalurahan 2024

Diagram ini menampilkan rata-rata hasil panen salak per musim dari masing-masing padukuhan, serta jumlah petani aktif yang terlibat. Padukuhan Ngandong mencatat hasil panen tertinggi dengan 1.200 kg per musim, didukung oleh jumlah petani terbanyak (65 orang) dan kualitas lahan yang baik. Kemiri dan Jati menyusul dengan hasil panen yang juga stabil. Di sisi lain, Grogol dan Ngangkruk menunjukkan angka yang lebih rendah, yang disebabkan oleh berkurangnya lahan aktif dan masalah hama. Informasi ini penting untuk melihat potensi dan tantangan produksi salak di tiap wilayah desa.

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kalurahan Gilikerto

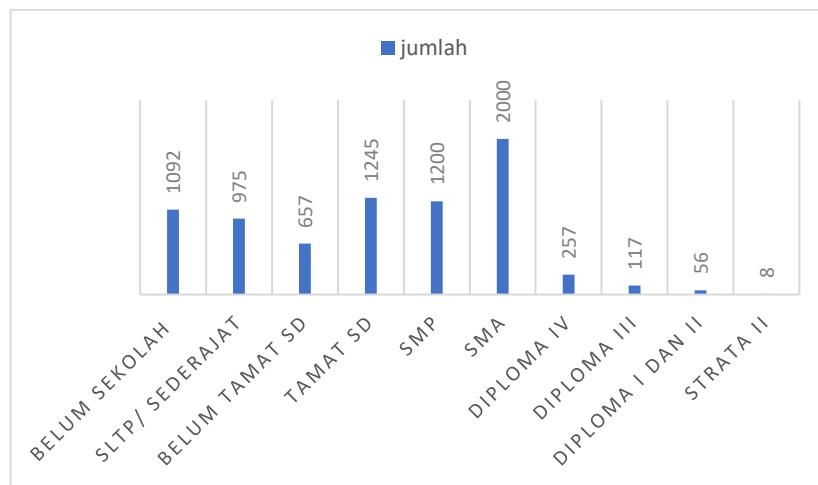
Gambar 2. 6 Data Penduduk Berdasarkan Agama



Sumber: Profil Kalurahan 2024

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pendidikan

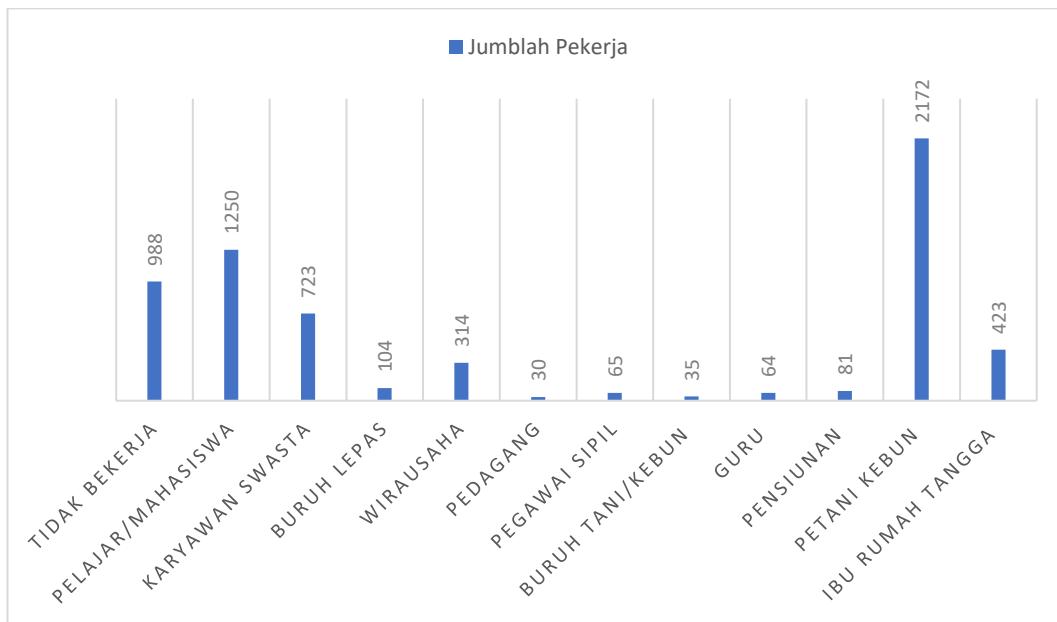
Gambar 2. 7 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pendidikan



Sumber: Profil Kalurahan 2024

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan.

Gambar 2. 8 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan



Sumber: Profil Kalurahan 2024

4. Wilayah Kalurahan Girikerto terbagi dalam 13 Padukuhan yaitu :

Tabel 2. 3 Nama Padukuhan

No	Nama Padukuhan	Nama Kampung & Perumahan
1.	Ngandong	Ngandong, Tritis, Relokasi Pelem
2.	Nganggring	Nganggring, Sidorejo, Tegalsari, Bening
3.	Kloposawit	Kloposawit, Pelem, Jineman
4.	Kemirikebo	Kemirikebo
5.	Sukerejo	Sukorejo, Cepit, Tegal Panggung
6.	Pancoh	Pancoh Wetan, Pancoh Kulon
7.	Nangsri	Nangsri Lor, Nangsri Kidul, Soprayan
8.	Bangunmulyo	Kuncen, Bangunmulyo
9.	Babandan	Babandan, Sorowangsan
10.	Glagahombo	Glagahombo Wetan, Glagahombo Kulon, Tanggung
11.	Daleman	Somoitan, Ponosaran Lor, Daleman
12.	Surodadi	Surodadi Lor, Nglempong, Bayan
13.	Karanggawang	Karanggawang, Ponosaran Kidul

Sumber: Profil Kalurahan 2024

B. Kondisi Alam Kalurahan Girikerto

1. Luas Wilayah dan Pemanfaatan Lahan

Kalurahan Girikerto memiliki total luas wilayah sebesar 1.002,97 hektare, yang secara umum terbagi menjadi tiga kategori utama penggunaan lahan, yaitu:

- a. Persawahan: 354,63 hektare
- b. Ladang atau tegalan: 385,10 hektare
- c. Permukiman dan fasilitas umum: 263,25 hektare

Selain itu, terdapat wilayah yang sebelumnya dikosongkan, yaitu kawasan Pathuk dan Kumpulrejo. Kawasan ini terdiri atas tegalan seluas 57,64 hektare dan pekarangan seluas 309,74 hektare, sehingga jika digabungkan, total luas wilayah Kalurahan Girikerto mencapai sekitar 1.240,75 hektare.

2. Topografi dan Geomorfologi

Kalurahan Girikerto berada di lereng selatan Gunung Merapi dengan ketinggian wilayah yang bervariasi antara 400 hingga 975 meter di atas permukaan laut (mdpl). Secara topografis, sebagian besar wilayah berupa lahan pertanian kering (kebun) dengan tingkat kemiringan lereng sekitar 15° hingga 30° , yang mencerminkan kontur berbukit ringan hingga sedang. Permukaan tanah umumnya datar hingga bergelombang dengan sedikit cekungan pada bagian alur sungai. Lapisan tanah atas memiliki ketebalan subur sekitar 20 cm dan didominasi oleh tanah berpasir, khas wilayah lereng gunung berapi.

3. Kondisi Hidrologi

Secara hidrologis, Kalurahan Girikerto terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu wilayah kering dan wilayah basah. Wilayah kering mencakup tiga padukuhan di bagian utara, yaitu Ngandong, Kemirikebo, dan Nganggring, yang tidak memiliki aliran sungai permanen. Meskipun terdapat beberapa sumber mata air, karakteristik morfologi menyebabkan air tidak dapat mengalir secara efektif ke wilayah tersebut. Akibatnya, ketiga padukuhan ini rentan mengalami kekeringan, terutama pada musim kemarau.

Dua padukuhan lainnya, yaitu Kloposawit dan Sukorejo, memiliki kondisi campuran. Bagian utara wilayahnya tergolong kering, sedangkan bagian selatan tergolong wilayah basah. Sementara itu, delapan padukuhan lainnya termasuk dalam wilayah basah dengan ketersediaan air yang relatif stabil sepanjang tahun. Air dari mata air alami di wilayah ini mengalir melalui sejumlah sungai kecil seperti Pengging, Sempor, Adem, Duren, dan Denggung, yang berperan penting dalam mendukung kebutuhan irigasi pertanian. Sumber air tanah juga dimanfaatkan oleh masyarakat di hampir seluruh padukuhan untuk memenuhi kebutuhan air bersih rumah tangga.

4. Kondisi Geologi

Wilayah Kalurahan Girikerto merupakan bagian dari lereng Gunung Merapi, sehingga secara geologis tersusun atas material endapan vulkanik. Proses pelapukan yang terjadi dalam jangka panjang menciptakan komposisi tanah yang beragam. Lima padukuhan di

bagian utara memiliki tanah berpasir dengan tingkat porositas sedang hingga tinggi, sedangkan delapan padukuhan lainnya didominasi oleh tanah hasil pelapukan lanjut, yang memiliki tingkat kesuburan tinggi dan sangat mendukung kegiatan pertanian.

5. Iklim dan Suhu

Kalurahan Girikerto berada dalam zona iklim tropis basah, dengan curah hujan rata-rata 22 mm per bulan. Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 17°C pada malam hari hingga mencapai 31°C pada siang hari, menciptakan iklim yang cukup nyaman dan mendukung produktivitas pertanian serta aktivitas harian masyarakat.

6. Flora dan Fauna

Kondisi tanah yang subur dan iklim yang sejuk menjadikan Kalurahan Girikerto sebagai tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman secara alami. Komoditas unggulan yang berkembang di wilayah ini adalah salak pondoh, yang menjadi identitas sekaligus penggerak ekonomi lokal. Selain itu, sayuran, buah-buahan, dan tanaman keras lainnya tumbuh dengan baik di lahan-lahan milik warga.

Keanekaragaman fauna didominasi oleh hewan piaraan milik warga, seperti kambing, ayam, dan sapi. Sedangkan fauna liar yang masih dijumpai umumnya adalah jenis burung, meskipun populasinya semakin berkurang. Pemerintah kalurahan telah mengambil langkah antisipatif dengan menerapkan aturan pelarangan perburuan terhadap satwa liar yang dilindungi.

7. Karakter Umum Lingkungan Alam

Secara keseluruhan, Kalurahan Girikerto memiliki karakter lingkungan yang khas: perpaduan antara kawasan pertanian, perkebunan, ladang, dan kawasan hutan. Wilayah hutan berada di bagian utara, yang sekaligus menjadi bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Semakin ke arah selatan, wilayah didominasi oleh ladang dan tegalan, terutama di padukuhan Ngandong, Nganggring, dan Kemirikebo, serta sebagian dari Kloposawit dan Sukorejo. Sementara itu, delapan padukuhan lainnya memiliki wilayah pertanian yang subur dan menjadi pusat utama kegiatan pertanian masyarakat.

C. Kondisi Geografis

Kalurahan Girikerto terletak di wilayah bagian utara Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, wilayah ini memiliki kontur dan batas wilayah yang cukup jelas dan beragam. Padukuhan Ngandong menempati posisi paling utara dan menjadi salah satu pintu gerbang wilayah Kalurahan Girikerto dari arah utara. Di sisi selatan, terdapat Padukuhan Karanggawang yang menjadi batas bawah wilayah administrasi kalurahan ini. Sementara itu, Padukuhan Pancoh dan Sukorejo berada di ujung timur wilayah, sedangkan Padukuhan Babadan menempati posisi paling barat.

Aksesibilitas ke seluruh wilayah Kalurahan Girikerto terbilang cukup baik. Jalan penghubung antar-padukuhan telah memungkinkan kendaraan

bermotor roda dua maupun roda empat untuk menjangkau hampir seluruh pelosok wilayah dengan relatif mudah. Kondisi ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat serta memperlancar pelayanan pemerintahan hingga tingkat padukuhan. Dari sisi jarak administratif, Kalurahan Girikerto berlokasi sekitar 3 Kilometer dari pusat pemerintahan Kapanewon Turi, sekitar 11 Kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Sleman, dan berjarak kurang lebih 22 Kilometer dari pusat pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak yang strategis ini membuat Kalurahan Girikerto cukup mudah dijangkau, baik oleh masyarakat lokal maupun pihak luar yang ingin berkunjung atau menjalin kerja sama pembangunan.

Secara administratif, Kalurahan Girikerto merupakan salah satu wilayah yang memiliki cakupan geografis cukup luas dengan kondisi topografi yang beragam. Wilayah ini terdiri atas sejumlah padukuhan yang terbagi lagi ke dalam Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), dengan persebaran penduduk yang relatif padat. Pembagian wilayah ini tidak hanya mencerminkan struktur administratif, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan budaya masyarakat setempat yang terikat kuat dalam struktur komunitas masing-masing.

Kalurahan Girikerto memiliki batas wilayah yang cukup jelas dan strategis, yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan kawasan konservasi Gunung Merapi (Taman Nasional Gunung Merapi/TNGM), yang

sekaligus menjadi bagian dari bentang alam penting di wilayah utara Sleman.

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kalurahan Purwobinangun, yang berada dalam wilayah Kapanewon Pakem.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalurahan Donokerto, yang juga merupakan bagian dari Kapanewon Turi.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kalurahan Wonokerto, wilayah tetangga yang turut membentuk jaringan sosial dan ekonomi lintas kalurahan.

Pembagian wilayah Kalurahan Girikerto ke dalam padukuhan hingga tingkat RT/RW dirancang untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan publik serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Struktur kewilayahan ini juga menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, pendataan kependudukan, serta pembentukan jejaring sosial yang aktif di lingkungan masyarakat.

D. Pemerintahan dan Lembaga

1. Visi

**Sejahtera, Mandiri, Religius, Berbudaya Dalam Lingkungan
Yang Lestari**

Sedangkan untuk mempermudah dalam penghafalan dan pengingat disingkat “SEMARNDALIL” penjabarannya adalah

a. Sejahtera:

Suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir atau batin secara merata. Beberapa untuk melihat ukuran kesejahteraan masyarakat dengan indeks pembangunan manusia, menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi secara merata.

b. Mandiri:

Suatu keadaan dimana Pemerintah Kaluraha Girikerto dapat mendayagunakan potensi yang ada dari sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya sosial budaya. Dapat memberikan solusi dalam setiap permasalahan dan konflik yang dengan beberapa cara dan sistem. Dapat mengidentifikasi peluang kebutuhan yang diperlukan dengan meningkatnya sarana dan prasarana perekonomian dan meningkatnya daya saing. Hal ini dapat dilihat nantinya ketika kondisi infrastruktur dan investasi meningkat. Selain itu meningkatnya pendapatan asli kalurahan yang nantinya dapat mencukupi kebutuhan pemerintah atupun masyarakat.

c. Religius:

Nilai-nilai keagamaan yang abadi dari hati nurani untuk Tuhan Yang Maha Esa. Dapat diimplementasikan

dengan peningkatan kualitas kerohanian masing-masing agama dalam menjalankan ibadahnya dengan dukungan masyarakat dan pemerintah namun juga nantinya tergantung kepada kepribadian masing-masing. Menjuring tinggi toleransi antar umat beragama dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama. Sekaligus menjaga kestabilan kondisi pemerintahan dalam menjalankan ibadah sesuai agama dengan saling menghormati dan menghargai. Memberikan pendidikan dalam hal agama yang sesuai dengan ajaran dan tuntunan diagama masing-masing pemeluk.

d. Berbudaya dalam Lingkungan yang Lestari:

Keadaan masyarakat yang sadar, terbina dan terdidik akan nilai-nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa meninggalkan warisan budaya dan seni. Indikator yang diharapkan adalah terciptanya pelestarian warisan budaya yang berbenda atau tak benda, melibatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan bakat seninya sampai kepada merupakan kebutuhan yang hakiki melekat pada keseharian kehidupan. Pelestarian kegiatan adat istiadat dengan menonjolkan masyarakat dan potensinya agar dapat menjalin hubungan yang baik dan bagus.

Visi Pemerintah Kalurahan Girikerto berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Kedua, Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJMD) Tahun 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”, Visi Pembangunan Kabupaten Sleman yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2024 Kabupaten Sleman yaitu “Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong”.

2. Misi

a. Bidang Pemerintahan :

- 1) Meningkatkan penataan administrasi Kalurahan. Misi dimaksudkan untuk mengelola dengan rapih dan teliti dalam menyusun dan mengatur dokumen yang telah ada ataupun dengan menata proses mekanisme dengan administrasi yang baik.
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengubah sistem pelayanan, yaitu tidak hanya sebagai pelayan masyarakat tetapi sebagai Pamong yaitu orang yang bisa melindungi dan momong masyarakat. Maksudnya adalah

dalam melayani kebutuhan masyarakat tidak hanya dengan menghasilkan dokumen dalam mengurus tapi memang dari adab, tingkah laku dan sopan santunnya menerapkan sesuai dengan kaidah jawa yang tidak bertentangan. Bisa memberikan suri tauladan yang baik pencerminan hidup dikehidupan bermasyarakat.

- 3) Penataan kinerja Pamong yaitu penerapan pelayanan yang maksimal. Maksudnya yaitu mengedepankan kepentingan umum daripada golongan atau individu.
- 4) Mewujudkan masyarakat Girikerto yang aman dan kondusif. Misi ini mempunyai maksud adalah menghindari dan memberikan rasa nyaman dalam kehidupan bermasyarakat dengan beberapa langkah diantaranya yakni dengan menggalakan kegiatan sosial kemasyarakatan.

3. Bidang Pembangunan :

- a. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui berbagai macam terobosan baru melalui :
 - 1) Bidang pertanian;
 - 2) Bidang peternakan;
 - 3) Bidang perikanan;
 - 4) Bidang wisata; dan
 - 5) Menggerakan dan meningkatkan BUMKal.
- b. Misi ini mempunyai maksud memberikan kesejahteraan peningkatan pendapan ekonomi masyarakat atau Pemerintah

Kalurahan dengan beberapa gagasan dan ide yang baru dari berbagai sektor potensi yang dimiliki kalurahan. Selain itu menggerakan badan usaha milik kalurahan sebagai eksekutor dan administrator dalam menjalankan usaha agar bias tertata dengan rapi dan lancar.

- c. Menerapkan pembangunan dengan skala prioritas. Misi ini memberikan pemenuhan kebutuhan perihal program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dilihat dari kebutuhan, manfaat dan dampak, dengan itu akan menciptakan kegiatan yang memang betul diharapkan masyarakat.
- d. Menggali potensi lain yang bisa membawa kesejahteraan masyarakat. Membuka wawasan kepada masyarakat agar lebih berinovasi dan berkembang dalam mencermati potensi yang ada dikewilayahannya masing-masing untuk bida diberdayakan menjadi sumber penghasilan warga.
- e. Menjaga dan meningkatkan kelestarian alam. Misi ini memiliki maksud agar sumber daya alam yang ada dapat terjaga dan lestari dengan menolak beberapa usaha masyarakat atau perusahaan dalam mengeksplorasi alam secara tidak benar.

4. Bidang Kemasyarakatan :

- a. Menjaga kerukunan intern dan antar umat beragama untuk mewujudkan masyarakat Girikerto yang memiliki jiwa toleransi dalam beragama. Maksudnya adalah kehidupan beragama dimasyarakat Girikerto agar tercipta saling menghargai dan

menghormati satu sama laing dengan kepercayaan yang berbeda dari segi aktifitas keagamaan atau dengan kegiatan yang lainnya. Mengedepankan musyawarah mufakat dan hubungan komunikasi yang terjalin dengan baik.

- b. Meningkatkan kualitas dalam melaksanakan penerapan beragama. Misi ini maksudnya adalah meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan beragama dengan pelatihan dan pembinaan agar keimanan dan ketaqwaan dapat meningkat.
- c. \Meningkatkan kualitas pendidikan. Maksudnya yaitu memberikan bantuan pendidikan dan pembinaan kepada masyarakat luas dengan pentingnya berpendidikan sebagai modal dalam kehidupan bermasyarakat dan kebutuhan hidup.
- d. Meningkatkan kualitas kesehatan Jaminan kesehatan masyarakat dengan menjalankan program-program bantuan kesehatan secara maksimal dengan penyediaan fasilitas medis atau pelayanan kepada masyarakat.
- e. Meningkatkan kualitas kepemudaan dalam wadah karang taruna. Mengembangkan potensi generasi muda dalam bidang apapun agar dapat inovatif dan kreatif tentunya dengan tidak mengenyampingkan kebudayaan yang ada. Pelaksanaan event olahraga setiap tahunnya untuk memberikan motivasi kepada para atlet olahraga.
- f. Menjaga dan melestarikan budaya Melaksanakan kegiatan kebudayaan dan menjaganya serta melestarikan adat istiadat yang

masih ada dikalangan kehidupan masyarakat. Menggelar kegiatan kebudayan secara berkala dan terstruktur.

Gambar 2. 9 Struktur Pemerintah Kalurahan Girikerto



Sumber: Profil Kalurahan Girikerto 2024

E. Sejarah Salak

Salak Pondoh (Salacca edulis Reinw. cv. Pondoh) secara ilmiah diklasifikasikan ke dalam divisi Spermatophyta (tumbuhan berbiji), sub divisi Angiospermae (tumbuhan berbiji tertutup). Dalam taksonomi lebih lanjut, tanaman ini termasuk dalam kelas *Monocotyledoneae* (berkeping satu), *ordo Arecales*, *famili Arecaceae* atau *Palmae* (keluarga palem), *genus Salacca*, spesies *Salacca edulis* Reinw., dan *varietas Salacca edulis Reinw. cv. Pondoh*.

Berdasarkan Profil Kabupaten Sleman Tanaman ini ditetapkan sebagai flora identitas Kabupaten Sleman karena merupakan varietas salak khas yang berasal dari wilayah tersebut serta memiliki nilai historis dan

kultural yang tinggi bagi masyarakat setempat. Keberadaannya telah menjadi sumber kebanggaan tersendiri bagi warga Sleman. Menurut catatan sejarah, pada tahun 1917, seorang Jogoboyo dari Desa Kapanewon Tempel bernama Partodiredjo menerima empat biji salak sebagai kenang-kenangan dari seorang warga negara Belanda yang akan kembali ke negaranya setelah masa tugas berakhir. Biji tersebut kemudian ditanam dan dibudidayakan. Hasilnya menunjukkan buah dengan rasa manis dan tidak sepat, berbeda dengan salak lokal yang dikenal sebelumnya.

Perkembangan lebih lanjut dilakukan sekitar tahun 1948 oleh Muhamadiwinarto, putra dari Partodiredjo, yang tinggal di Dusun Sokobinangun, Kalurahan Merdikorejo, Kapanewon Tempel. Karena keunggulannya dari segi rasa, budidaya Salak Pondoh berkembang dengan cepat dan meluas, bahkan hingga ke luar wilayah Kabupaten Sleman.

Secara morfologis, tanaman Salak Pondoh memiliki batang tegak yang tersembunyi di balik pelepasan daun yang rapat dan berduri. Tangkai daunnya dapat mencapai panjang antara 2 hingga 3 meter, dengan helai daun berbentuk garis lanset yang panjangnya berkisar antara 2 hingga 4 meter, berujung runcing. Tanaman ini dapat tumbuh hingga mencapai tinggi 4 hingga 7 meter dan memiliki umur produktif hingga puluhan tahun.

Salak Pondoh tumbuh secara berumpun dan menghasilkan buah dengan bentuk menyerupai segitiga bulat telur terbalik. Panjang buah berkisar antara 2,5 hingga 7,5 cm, dengan ketebalan daging buah sekitar 1,5 cm. Kulit buahnya tersusun rapi menyerupai genting, memiliki tekstur menyerupai sisik, dan berwarna cokelat kehitaman. Lahan untuk Tanaman Salak

Lahan salak di Kalurahan Girikerto tersebar hampir di seluruh padukuhan, namun konsentrasi tertinggi terdapat di Padukuhan Ngandong, Kemiri, dan Jati. Total luas lahan yang ditanami salak mencapai sekitar 102 hektar, berdasarkan estimasi tahun 2023–2024. Jenis lahan yang digunakan meliputi:

- a. Tegalan dan kebun pekarangan milik warga yang ditanami secara monokultur maupun tumpangsari.
- b. Lahan produktif yang memiliki sistem irigasi sederhana dan perawatan teratur.
- c. Lahan dataran lereng Merapi yang subur dan mendukung pertumbuhan salak secara alami.

Gambar 2. 10 Kepemilikan Lahan Organik Endang Styomurni



Sumber: Dokumentasi Penelitian Tahun 2025

Pemanfaatan lahan ini dilakukan oleh petani secara individu maupun melalui kelompok tani. Beberapa petani telah mengembangkan sistem tanam berkelanjutan agar tanah tidak cepat

rusak, dengan rotasi tanaman atau penanaman sela seperti pisang dan pepaya.

1. Produk Olahan Salak (Produk Turunan)

Selain dijual dalam bentuk buah segar, salak pondoh dari Kalurahan Girikerto juga diolah menjadi berbagai produk turunan (produk olahan) oleh kelompok usaha masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga dan UMKM lokal. Beberapa produk olahan salak yang dikenal antara lain:

Tabel 2. 4 Jenis Produk Olahan Dari Salak

Nama Produk	Bentuk Olahan	Produksi Oleh
Dodol Salak	Makanan manis kenyal	Kelompok wanita tani/UMKM
Keripik Salak	Camilan kering renyah	UMKM pengolah rumah tangga
Sirup Salak	Minuman manis botolan	Usaha mikro lokal
Selai Salak	Olesan roti/makanan	Inovasi kelompok wanita
Manisan Salak	Buah awetan manis	Diproduksi saat musim panen

Sumber: Hasil Wawancara Penelitian Tahun 2025

2. Salak sebagai Produk Unggulan Kalurahan Girikerto

Salak pondoh telah menjadi ikon pertanian Kalurahan Girikerto, tidak hanya sebagai komoditas andalan tetapi juga sebagai simbol identitas lokal. Beberapa alasan mengapa salak dikategorikan sebagai produk unggulan antara lain:

- a. Kualitas rasa: Salak pondoh Girikerto dikenal manis tanpa sepat, dengan daging buah tebal dan aroma khas.
- b. Kuantitas produksi: Setiap musim panen, Girikerto mampu menyuplai salak ke pasar tradisional, pengepul, hingga wisata agro.
- c. Peran ekonomi: Sebagian besar penduduk menggantungkan penghasilan dari hasil kebun salak, baik langsung dari panen maupun dari pengolahan.
- d. Warisan budaya lokal: Pengetahuan bertani salak diwariskan turun-temurun, dan menjadi bagian dari kehidupan sosial serta tradisi masyarakat setempat.
- e. Potensi wisata agro: Lokasi kebun salak yang menarik dan luas juga mendukung program desa wisata berbasis pertanian, yang sering dikunjungi oleh pelajar dan wisatawan.

Gambar 2. 11 Potensi Wisata Agro Salak Pondoh



Sumber: Dokumentasi Penelitian Tahun 2025

Salak pondoh merupakan komoditas unggulan dari Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman. Produk ini bukan sekadar hasil pertanian biasa, tetapi telah menjadi identitas desa serta penopang utama ekonomi masyarakat. Keunggulan salak pondoh Girikerto tidak hanya terletak pada kualitas fisiknya, tetapi juga pada keberlanjutan sosial, budaya, dan ekonomi yang dibangunnya selama bertahun-tahun.

BAB III

PERLINDUNGAN PETANI SALAK OLEH PEMERINTAH

KALURAHAN GIRIKERTO

Pemerintah Kalurahan Girikerto sebagai penyelenggara pemerintahan tingkat desa memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan lokal, termasuk regulasi perlindungan terhadap sektor pertanian. Namun berdasarkan temuan di lapangan, sampai saat ini belum ada Peraturan Kalurahan (Perkal) yang secara khusus mengatur perlindungan petani salak, baik dari sisi lahan, harga jual, maupun distribusi hasil panen. Hal ini menyebabkan lemahnya posisi petani dalam menghadapi dinamika pasar dan ancaman alih fungsi lahan.

Fungsi regulator dari pemerintah desa seharusnya diimplementasikan dalam bentuk regulasi tertulis yang berpihak pada petani. Regulasi tersebut dapat berupa perlindungan harga dasar salak, larangan konversi lahan tanpa izin, atau penguatan kelembagaan petani melalui pengakuan legalitas kelompok tani. Namun dalam kenyataannya, kebijakan-kebijakan yang ada masih bersifat umum dan tidak menyasar secara spesifik pada kebutuhan petani salak.

A. Ketersediaan regulasi yang berpihak kepada petani.

Salah satu isu penting yang diangkat oleh informan lapangan adalah tidak adanya regulasi yang mencegah alih fungsi lahan salak menjadi lahan hortikultura lain seperti cabai atau tomat. Data lapangan menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir terjadi penurunan luasan lahan salak secara signifikan dari 106 hektar menjadi 87 hektar. Alih fungsi ini sebagian besar

terjadi karena petani merasa salak tidak menguntungkan akibat harga yang terus turun saat panen raya. Tanpa kebijakan yang mengatur hal ini, laju alih fungsi akan sulit dikendalikan.

Wawancara dengan Pak Krisna Cahyan (Carik) memperkuat kondisi tersebut:

“Kami menyadari perlunya Peraturan Kalurahan untuk mengatur perlindungan lahan salak, tetapi sampai sekarang memang belum sempat kami susun karena keterbatasan SDM dan belum ada desakan langsung dari kelompok tani.” (Wawancara; Selasa 15 Juli 2025)

Pernyataan dari Pak Krisna Cahyan (Carik) menunjukkan bahwa meskipun pemerintah kalurahan menyadari pentingnya perlindungan terhadap lahan salak melalui regulasi formal seperti Peraturan Kalurahan, upaya tersebut belum terealisasi. Hal ini mengindikasikan adanya keterbatasan inisiatif dari pihak pemerintah kalurahan, yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dan tidak adanya dorongan kuat dari kelompok tani. Dari sudut pandang petani, hal ini dapat mencerminkan bahwa peran pemerintah kalurahan masih bersifat pasif dan belum responsif terhadap kebutuhan strategis petani, khususnya dalam hal perlindungan lahan pertanian salak secara hukum dan kelembagaan.

Ketiadaan regulasi juga berdampak pada tidak adanya skema pengendalian harga di tingkat kalurahan. Harga salak yang bisa turun drastis hingga Rp3.000/kg saat panen raya tidak dapat dikendalikan oleh petani karena tidak ada intervensi dari pemerintah kalurahan, baik melalui penguatan koperasi, penetapan harga minimum, maupun skema subsidi distribusi. Dalam posisi ini, petani menjadi pihak yang paling dirugikan.

Ibu Endang selaku Ketua Kelompok Tani menyatakan:

“Kalau bisa sih dari desa ada aturan biar lahan salak tidak gampang diganti jadi cabai atau sayuran lain. Soalnya makin lama salak makin ditinggal karena harganya nggak jelas.”(Wawancara; Rabu 22 Juli 2025)

Pernyataan Pak Krisna Cahyan (Carik) menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan sebenarnya memiliki kesadaran akan pentingnya regulasi untuk perlindungan lahan salak. Namun, hingga kini belum ada langkah konkret yang diambil karena terbatasnya sumber daya manusia dan belum adanya tekanan langsung dari kelompok tani. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemerintah kalurahan bersikap pasif dan belum menunjukkan inisiatif kuat dalam membentuk kebijakan strategis terkait perlindungan pertanian lokal.

Ketiadaan regulasi tersebut berdampak lebih jauh, salah satunya adalah tidak adanya mekanisme pengendalian harga salak di tingkat desa. Saat terjadi panen raya, harga salak bisa jatuh drastis hingga Rp3.000/kg, dan petani tidak memiliki daya tawar karena tidak ada intervensi kebijakan dari pemerintah kalurahan. Tidak adanya kelembagaan seperti koperasi yang kuat, tidak ada penetapan harga dasar, serta ketiadaan skema subsidi distribusi menyebabkan petani harus menanggung sendiri risiko pasar yang tidak stabil.

Dalam kondisi ini, petani menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka tidak hanya menghadapi risiko penurunan harga yang tajam, tetapi juga kehilangan motivasi untuk tetap membudidayakan salak. Ketiadaan jaminan perlindungan dari pemerintah desa membuat komoditas salak semakin ditinggalkan, dan alih fungsi lahan menjadi pilihan yang semakin banyak dipertimbangkan oleh petani demi kelangsungan ekonomi mereka. Pernyataan Ibu Endang, Ketua Kelompok Tani, memperkuat pandangan

tersebut. Ia menyampaikan harapan agar pemerintah desa membuat aturan yang melindungi lahan salak agar tidak mudah diganti dengan komoditas lain. Harapan ini menunjukkan bahwa petani sebenarnya masih ingin mempertahankan budidaya salak, namun mereka membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah desa. Dengan kata lain, petani menilai bahwa peran pemerintah kalurahan sejauh ini belum mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi di lapangan.

Dari berbagai temuan ini dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa sebagai regulator belum berjalan secara optimal. Ketiadaan produk hukum lokal yang berpihak pada petani membuat posisi petani salak sangat rentan terhadap kerugian ekonomi dan tekanan pasar. Untuk itu, diperlukan dorongan dari berbagai pihak agar desa segera menyusun Perkal yang berpihak pada petani, melibatkan kelompok tani, akademisi, dan dinas terkait dalam proses perumusan kebijakan.

Informan menjelaskan bahwa pemerintah Kalurahan tidak secara aktif memberikan pelatihan budidaya atau bantuan pupuk, tetapi membuka ruang bagi kelompok tani untuk mengusulkan kegiatan. Kalurahan kemudian akan mempertimbangkan proposal dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang diajukan oleh kelompok, lalu membawanya ke forum musyawarah desa. Jika dianggap prioritas dan sesuai dengan kemampuan anggaran, kegiatan tersebut akan didanai.

Sebagai mana di jelaskan oleh ibu Endang selaku ketua kelompok tani “Kalau dari desa kelurahan itu, support kegiatan itu difokuskan pada Gapoktan. Gapoktan mau mengadakan kegiatan apa, silakan membuat program, kemudian dibuat RAB, disampaikan ke desa. Kalau dianggap prioritas, pasti akan di-‘iya’-kan.” (Wawancara; Rabu 22 Juli 2025)

Pemerintah Kalurahan tidak secara langsung menjalankan program pelatihan atau memberikan bantuan pertanian secara aktif kepada petani salak. Namun, pemerintah desa membuka ruang partisipasi bagi kelompok tani melalui mekanisme pengusulan kegiatan. Kelompok tani, khususnya Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), diberi kewenangan untuk menyusun program kegiatan lengkap dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar pengajuan bantuan.

Setelah proposal diajukan, pihak kalurahan akan menelaah usulan tersebut dalam forum musyawarah desa. Kegiatan yang dinilai prioritas dan sesuai dengan kemampuan anggaran desa berpeluang besar untuk mendapat dukungan pendanaan. Skema ini menunjukkan bahwa peran pemerintah kalurahan bersifat fasilitatif, bukan inisiatif, sehingga keberhasilan program pemberdayaan sangat tergantung pada seberapa aktif kelompok tani dalam menyusun dan menyampaikan usulan.

Pernyataan Ibu Endang selaku Ketua Kelompok Tani menegaskan bahwa dukungan pemerintah kalurahan memang lebih bersifat responsif terhadap inisiatif dari Gapoktan. Dengan kata lain, jika tidak ada usulan, maka tidak ada program yang dijalankan. Pola semacam ini menunjukkan bahwa pemerintah desa cenderung menyerahkan perencanaan kegiatan sepenuhnya kepada kelompok tani, dan hanya akan menindaklanjuti jika ada permintaan resmi.

Dari sudut pandang petani, hal ini dapat dipahami sebagai bentuk kebebasan dalam mengatur kebutuhan kelompok, namun di sisi lain juga bisa diartikan sebagai minimnya dorongan dan arahan strategis dari pihak

kalurahan. Petani tidak melihat adanya peran proaktif dari pemerintah desa dalam mengembangkan sektor pertanian salak secara terencana. Akibatnya, keberlangsungan kegiatan pertanian sangat bergantung pada kapasitas administratif dan inisiatif internal kelompok tani itu sendiri.

Namun demikian, informan juga menegaskan bahwa tidak semua usulan petani akan otomatis disetujui. Pemerintah Kalurahan tetap melakukan seleksi dan mempertimbangkan urgensi kegiatan, mengingat dana desa harus dibagi ke banyak sektor, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, perhatian Kalurahan terhadap pertanian tidak sebesar perhatian Dinas Pertanian.

Di perkuat lagi dengan argumen bapak Sukma selaku petani salak

“Dana desa itu terbatas, Mbak. Dana desa sangat terbatas dan harus dibagi sebeginu banyak program pemerintah, tidak hanya di pertanian.”
Wawancara; Jumat 25 Juli 2025)

Meskipun pemerintah Kalurahan membuka ruang partisipasi bagi kelompok tani untuk mengusulkan program, tidak semua usulan dapat langsung disetujui. Setiap pengajuan akan melalui proses seleksi dan penilaian berdasarkan urgensi serta kesesuaian dengan prioritas pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola anggaran, mengingat sumber daya dana desa yang terbatas dan harus dibagi untuk banyak sektor.

Dana desa tidak hanya dialokasikan untuk bidang pertanian, tetapi juga harus mencakup kebutuhan lain seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta program pemberdayaan masyarakat secara umum. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kelompok tani, karena mereka harus

bersaing dengan program-program dari sektor lain untuk mendapatkan dukungan dana. Hal ini mengakibatkan perhatian Kalurahan terhadap sektor pertanian tidak seintensif dinas teknis seperti Dinas Pertanian.

Pernyataan Bapak Sukma sebagai petani salak menegaskan realitas tersebut. Ia menyadari bahwa anggaran desa sangat terbatas dan tidak bisa difokuskan hanya pada pertanian. Argumen ini mencerminkan pemahaman dari pihak petani bahwa ada keterbatasan fiskal di tingkat desa, namun juga sekaligus mengindikasikan adanya kekecewaan tersirat karena sektor pertanian tidak selalu menjadi prioritas utama dalam kebijakan kalurahan.

Dari sudut pandang petani, peran pemerintah Kalurahan dalam mendukung pertanian, khususnya budidaya salak, masih belum maksimal. Meskipun mekanisme pengusulan program terbuka, kecilnya porsi anggaran yang dapat dialokasikan untuk pertanian menunjukkan bahwa sektor ini belum mendapat perhatian yang proporsional. Hal ini berdampak pada terbatasnya dukungan konkret yang bisa diterima petani di lapangan, baik dalam bentuk pelatihan, subsidi, maupun infrastruktur pertanian.

Informan juga menyampaikan bahwa petani harus proaktif dan tidak hanya menunggu bantuan datang dari pemerintah Kalurahan. Justru petani harus membuat perencanaan sendiri sesuai kebutuhannya, kemudian mengajukan ke Kalurahan. Pemerintah desa akan melihat apakah kegiatan itu sesuai visi pembangunan Kalurahan dan apakah bisa diakomodasi dalam anggaran tahun berjalan.

Dalam wawancara dengan Ibu Endang selaku ketua kelompok tani menyampaikan bahwa:

“Bukan desa kelurahan yang menawari petani mau nyupport apa. Tapi petani butuh apa, kira-kira itu urgent atau tidak. Nanti kalau petani mintanya yang aneh-aneh ya, ya nanti dulu.” (Wawancara; Rabu 22 Juli 2025)

Informasi yang disampaikan oleh informan menunjukkan bahwa mekanisme dukungan pemerintah Kalurahan terhadap petani bersifat responsif, bukan inisiatif. Artinya, pemerintah desa tidak secara aktif menawarkan bantuan atau program tertentu kepada petani. Sebaliknya, petani diharapkan untuk proaktif dalam merencanakan kebutuhannya sendiri dan mengajukan usulan kepada Kalurahan. Usulan tersebut kemudian akan dievaluasi apakah sesuai dengan visi pembangunan desa dan bisa diakomodasi dalam anggaran tahun berjalan.

Pernyataan Ibu Endang selaku Ketua Kelompok Tani menegaskan bahwa tanggung jawab utama dalam perencanaan kegiatan berada di tangan petani sendiri. Pemerintah Kalurahan hanya akan merespons jika ada permintaan yang masuk akal, relevan, dan bersifat mendesak. Jika usulan dianggap tidak sesuai atau tidak prioritas, maka kemungkinan besar akan ditunda atau tidak diterima. Hal ini mencerminkan adanya standar seleksi tertentu dari pihak desa terhadap program yang akan didukung.

Model seperti ini menempatkan petani sebagai subjek aktif dalam perencanaan pembangunan sektor pertanian. Namun di sisi lain, model ini juga menyiratkan bahwa tidak ada kepastian dukungan dari pemerintah desa jika petani tidak mampu menyusun rencana atau proposal yang kuat. Bagi kelompok tani yang kurang memiliki kapasitas administrasi atau akses informasi, sistem ini dapat menjadi hambatan tersendiri untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan.

Dari perspektif petani, pendekatan semacam ini bisa dipandang sebagai bentuk kemandirian, tetapi juga menunjukkan lemahnya peran inisiatif dan pendampingan dari pemerintah Kalurahan. Harapan petani untuk mendapat arahan, bimbingan, atau inisiatif program dari pihak desa masih belum sepenuhnya terpenuhi. Akibatnya, jika petani tidak cukup proaktif atau proposal tidak dianggap prioritas, maka kebutuhan pertanian bisa saja tidak terakomodasi dalam perencanaan pembangunan desa.

Lebih lanjut, informan juga menegaskan bahwa tidak benar jika dikatakan pemerintah Kalurahan tidak peduli pada pertanian. Hanya saja, ranah teknis pertanian memang lebih menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian. Kalurahan lebih bertugas pada aspek administratif, fasilitasi kegiatan, dan membuka ruang partisipasi dalam penganggaran musyawarah desa.

Selanjutnya Ibu Endang selaku ketua kelompok tani menyampaikan bahwa

“Bukan berarti desa kelurahan itu tidak memperhatikan kelompok tani. Beda. Kalau pertanian itu yang lebih concern itu Dinas Pertanian.”
(Wawancara; Rabu 22 Juli 2025)

Informan menjelaskan bahwa persepsi pemerintah Kalurahan tidak peduli terhadap sektor pertanian sebenarnya kurang tepat. Pemerintah desa memiliki peran yang berbeda dengan dinas teknis, di mana fokus utamanya lebih kepada aspek administratif, fasilitasi kegiatan, serta membuka ruang partisipasi melalui mekanisme musyawarah desa. Dengan kata lain, Kalurahan berfungsi sebagai penghubung dan pendukung proses perencanaan

pembangunan, termasuk di bidang pertanian, tetapi bukan sebagai pelaksana teknis.

Pernyataan dari Ibu Endang menegaskan bahwa perhatian terhadap pertanian bukan diabaikan oleh pihak Kalurahan, melainkan karena urusan teknis pertanian seperti pelatihan, penyuluhan, dan inovasi teknologi memang menjadi domain Dinas Pertanian. Oleh karena itu, pemerintah Kalurahan cenderung hanya mendukung secara struktural dan administratif, sementara kebutuhan teknis lebih banyak diarahkan ke dinas terkait.

Hal ini menunjukkan adanya pembagian peran yang cukup jelas antara pemerintah Kalurahan dan Dinas Pertanian. Kalurahan mendukung dari sisi proses dan anggaran desa, sementara Dinas Pertanian menjadi institusi utama yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan teknis di lapangan. Meski demikian, ketergantungan terhadap peran aktif petani dan keterbatasan dana desa membuat dukungan dari Kalurahan terhadap pertanian sering kali tampak minim secara nyata.

Dari sudut pandang petani, peran Kalurahan memang dirasakan tidak terlalu kuat dalam hal teknis pertanian. Namun, penjelasan ini memberi pemahaman bahwa kelemahan tersebut bukan semata-mata karena kurangnya perhatian, melainkan karena pembagian tugas antar-lembaga. Petani yang memahami struktur ini akan lebih mudah mengarahkan kebutuhan mereka ke pihak yang tepat, meskipun harapan terhadap peran lebih aktif dari Kalurahan tetap menjadi suara yang konsisten di kalangan kelompok tani.

Secara keseluruhan, peran Pemerintah Kalurahan dalam mendukung petani salak dapat dilihat dari upayanya memfasilitasi Gapoktan,

menyediakan akses anggaran melalui Dana Desa, dan membuka ruang partisipatif bagi kelompok tani dalam penyusunan program. Walaupun tidak bersifat teknis, peran administratif dan penganggaran dari Kalurahan tetap memiliki kontribusi dalam keberlangsungan pertanian salak secara kelembagaan. Selain dari eksekutif desa dan instansi teknis seperti Dinas Pertanian, informan juga menyebut bahwa legislatif atau anggota dewan turut memiliki peran dalam mendukung kegiatan pertanian salak. Terutama mereka yang duduk di Komisi B DPRD Kabupaten Sleman, yang secara khusus membidangi urusan pertanian dan perekonomian rakyat.

Informan menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, pendampingan program pertanian tidak hanya datang dari dinas teknis, tetapi juga melalui jalur aspirasi anggota dewan. Para legislator yang memiliki perhatian terhadap dunia pertanian seringkali turun langsung memberikan dorongan kebijakan, mendorong percepatan program, atau menjembatani kelompok tani agar masuk dalam program bantuan dan pelatihan dari instansi terkait.

Dalam wawancara bersama bapak sukma selaku petani mengatakan bahwa:

“Kami juga didampingi oleh dewan, terutama yang dari Komisi B. Kalau ada program dari pusat atau dari provinsi, mereka biasanya ikut memfasilitasi, karena tidak semua bisa dijangkau oleh Dinas Pertanian saja.” (Wawancara; Jumat 25 Juli 2025)

Informan menyampaikan bahwa pemerintah Kalurahan pernah memberikan dukungan berupa pengadaan bibit salak madu, yang merupakan varietas unggulan. Bantuan ini tidak datang secara langsung dari Kalurahan, tetapi diberikan setelah adanya usulan formal dari kelompok tani. Hal ini menunjukkan bahwa Kalurahan bersedia memfasilitasi kelompok tani

(Gapoktan), selama ada pengajuan yang jelas dan masuk dalam prioritas pembangunan desa.

Di tegaskan lagi dengan argumen Bapak Sukma selaku petani mengatakan bahwa:

“Kalau dari desa kelurahan itu, dulu pernah mensupport untuk petani itu salak itu pengadaan bibit salak madu... dan itu sudah terealisasi.” (Wawancara; Jumat 25 Juli 2025)

Mendorong petani untuk mengajukan program dan RAB agar bisa didanai oleh desa. Pemerintah Kalurahan tidak menawarkan langsung bantuan kepada petani, melainkan memberi ruang agar petani mengajukan sendiri program yang dibutuhkan, lengkap dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Jika proposal tersebut dinilai layak dan sesuai dengan arah kebijakan desa, maka akan dimasukkan ke dalam anggaran.

Berbeda dengan argumen Ibu Endang mengatakan bahwa:

“Kami yang mengajukan sendiri pengadaan bibit. Jadi, dari pihak petani memang diminta untuk proaktif.”(Wawancara; Rabu 22 Juli 2025)

Informan menjelaskan bahwa meskipun pemerintah Kalurahan turut serta dalam proses musyawarah desa, perhatian terhadap sektor pertanian tidak menjadi fokus utama. Banyak sektor lain yang juga menjadi perhatian, sehingga program pertanian sering kali harus bersaing dengan kebutuhan sektor lain dalam pembahasan APBKAL.

Dalam wawancara dengan bapak sukma selaku petani mengatakan bahwa:

“Kalurahan memang ikut dalam musyawarah, tapi fokus utamanya bukan hanya pertanian. Banyak program lain yang harus dibagi juga.” (Wawancara; Jumat 25 Juli 2025)

Salah satu bentuk nyata keterlibatan Kalurahan adalah dalam kegiatan pelatihan UMKM olahan salak. Informan menyebutkan bahwa petani, khususnya ibu-ibu, dilatih mengolah salak menjadi produk bernilai jual tinggi seperti dodol, keripik, kurma salak, teh kulit salak, dan kopi biji salak. Namun demikian, meskipun keterampilan pengolahan meningkat, tantangan justru muncul di aspek pemasaran.

Ditegas kan lagi oleh Ibu Endang Selaku ketua kelompok tani mengatakan bahwa:

“Pelatihan dari desa sudah bagus banget, Mbak. Tapi masalahnya, kami bisa bikin tapi nggak bisa jual. Masalahnya di pemasaran. Dana desa itu terbatas, harus dibagi ke banyak sektor. Jadi untuk pertanian tidak bisa banyak. Untuk budidaya dan teknis itu ya tetap dari Dinas Pertanian.”(Wawancara; Rabu 22 Juli 2025)

Keterlibatan tidak langsung, karena Dana Desa terbagi ke banyak sektor lain. Informan menegaskan bahwa meskipun Kalurahan punya perhatian terhadap pertanian, alokasi Dana Desa harus dibagi untuk berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Oleh karena itu, perhatian terhadap pertanian cenderung bersifat tidak langsung dan selektif, tergantung dari prioritas yang sedang diutamakan.

B. Peran sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, Pemerintah Kalurahan Girikerto memiliki tanggung jawab untuk menjembatani kebutuhan petani dengan berbagai sumber daya, baik itu lembaga pemerintah, pihak swasta, maupun institusi keuangan. Fasilitasi ini dapat berupa penyediaan bantuan pertanian, akses ke pelatihan, penghubung ke pasar, maupun pendampingan teknis. Namun hasil

temuan lapangan menunjukkan bahwa peran fasilitasi ini masih bersifat terbatas dan belum menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi petani salak.

Upaya fasilitasi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa antara lain adalah penyaluran pupuk bersubsidi melalui kelompok tani, serta koordinasi pelatihan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sleman terkait pengendalian hama. Namun dalam pelaksanaannya, distribusi pupuk masih sering mengalami keterlambatan, dan jumlah bantuan tidak mencukupi kebutuhan seluruh petani. Hal ini disebabkan oleh kuota yang terbatas dan lemahnya perencanaan kebutuhan dari kelompok tani.

Wawancara dengan Bapak Sukma Petani Salak mengungkapkan keluhan berikut:

“Pupuk memang kadang dibantu lewat kelompok, tapi sering telat datang. Kami juga nggak bisa banyak ngatur karena kuotanya nggak sesuai dengan jumlah petani di sini.” (Wawancara; Jumat 25 Juli 2025)

Selain itu, akses pasar bagi petani salak juga belum menjadi perhatian khusus pemerintah kalurahan. Petani tetap menjual hasil panen secara individu kepada tengkulak atau pengepul, tanpa adanya mekanisme perlindungan harga atau fasilitas pengolahan dan penyimpanan. Hal ini menjadikan posisi tawar petani sangat lemah, terutama saat panen raya ketika harga salak anjlok drastis.

Wawancara dengan Ibu Sukma Selaku Ketua Kelompok Tani memperkuat temuan tersebut:

“Kalurahan seharusnya bisa membentuk koperasi atau BUMDes unit perdagangan hasil pertanian. Tapi sampai sekarang belum ada fasilitasi ke arah sana, padahal ini penting untuk menjaga harga.” (Wawancara; Rabu 22 Juli 2025)

Fasilitasi dalam bentuk pelatihan budidaya atau inovasi produk olahan juga belum menjadi program prioritas. Pemerintah desa belum menyusun agenda tahunan yang berfokus pada peningkatan kapasitas petani salak. Kegiatan pelatihan yang ada biasanya hanya berlangsung satu kali dan tidak berkelanjutan. Akibatnya, petani tidak memiliki keterampilan tambahan yang bisa memperkuat usaha tani mereka, baik dari sisi teknik budidaya, pengolahan, maupun pemasaran.

Secara keseluruhan, fungsi fasilitator pemerintah desa masih terbatas pada urusan teknis dasar dan belum menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi petani secara menyeluruh. Desa belum berperan aktif sebagai jembatan antara petani dan peluang pasar modern, seperti e-commerce, koperasi, atau kemitraan dengan lembaga luar. Padahal dengan kekuatan kelembagaan yang dimiliki desa, pemerintah kalurahan dapat menjadi aktor strategis dalam mengubah posisi petani dari pihak pasif menjadi subjek yang berdaya dalam rantai ekonomi local

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan Pemerintah Kalurahan Girikerto, diketahui bahwa hingga saat ini belum terdapat Peraturan Desa (Perdes) atau kebijakan tertulis secara khusus yang mengatur tentang perlindungan atau penguatan bagi petani salak. Meskipun demikian, pihak kalurahan tidak menutup mata terhadap pentingnya komoditas salak pondoh dan salak madu yang selama ini menjadi ikon pertanian Kalurahan Girikerto. Pemerintah Kalurahan menyampaikan bahwa dukungan terhadap petani tetap dilakukan, meski bersifat tidak formal atau tidak diatur secara eksplisit dalam dokumen hukum desa. Bentuk dukungan itu biasanya melalui

musyawarah desa, forum perencanaan tahunan, atau melalui fasilitasi kegiatan kelompok tani dan UMKM salak.

Wawancara dengan Bapak Skimirin Selaku Kasi Pemerintah memperkuat kondisi tersebut:

“Kalurahan memang belum punya Perdes khusus untuk perlindungan petani salak. Tapi kami fasilitasi lewat musyawarah, kegiatan kelompok, dan penguatan forum-forum tani.” (Wawancara, senin 14 juli 2025)

Tidak adanya regulasi spesifik tersebut juga disebabkan oleh luasnya bidang yang menjadi kewenangan desa, serta keterbatasan sumber daya dan anggaran yang harus dibagi untuk sektor lain seperti infrastruktur, sosial, dan kesehatan. Dengan demikian, perhatian terhadap petani salak lebih diakomodasi dalam bentuk program-program desa yang fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun belum ada peraturan yang eksplisit, informan dari kalurahan tetap menganggap pentingnya salak sebagai identitas lokal. Oleh sebab itu, langkah-langkah ke depan yang lebih sistematis masih terbuka, termasuk kemungkinan pembentukan regulasi atau program desa yang lebih terfokus pada sektor pertanian salak.

Dalam wawancara, pihak Pemerintah Kalurahan Girikerto menjelaskan bahwa komoditas salak, khususnya salak pondoh dan salak madu, menjadi perhatian penting pemerintah desa, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam dokumen perencanaan resmi seperti RPJMDes atau RKPDes. Hal ini terjadi karena dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut, sektor pertanian dicakup secara umum tanpa menyebut komoditas tertentu.

Wawancara dengan Bapak Skimirin Selaku Kasi Pemerintah memperkuat kondisi tersebut:

“Kalau di dokumen perencanaan memang tidak tertulis khusus untuk salak, tapi ada program pertanian dan UMKM yang bisa untuk petani salak.” (Wawancara, senin 14 juli 2025)

Walaupun tidak tercantum secara langsung, dukungan terhadap pertanian salak tetap dilakukan melalui kegiatan yang bersifat terbuka dan fleksibel, seperti pelatihan UMKM olahan salak, fasilitasi promosi produk, serta pengadaan bibit. Semua kegiatan tersebut dimasukkan ke dalam program desa dengan tajuk umum seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan kelompok tani, atau pengembangan potensi lokal. Kebijakan ini mencerminkan bahwa pemerintah kalurahan lebih memilih pendekatan pragmatis dengan mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat petani dalam satu kerangka program umum, dibanding menyusun program sektoral yang terlalu sempit. Hal ini dinilai lebih sesuai dengan kemampuan anggaran dan beban kerja pemerintah desa.

Dengan tetap menjadikan salak sebagai komoditas unggulan lokal, Pemerintah Kalurahan Girikerto berharap kegiatan pertanian dan pengolahan salak dapat terus berjalan melalui sinergi antara program pemerintah, kelompok tani, serta lembaga eksternal seperti dinas teknis dan perguruan tinggi. Pemerintah Kalurahan Girikerto menegaskan bahwa salah satu bentuk keterlibatan langsung mereka dalam mendukung petani salak adalah dengan memberikan ruang bagi kelompok tani untuk menyampaikan usulan kegiatan melalui musyawarah desa. Dalam setiap proses penyusunan program dan kegiatan tahunan desa, petani diberi kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan mereka baik berupa bantuan bibit, pelatihan, maupun dukungan promosi.

Wawancara dengan Pak Krisna Cahyan (Carik) memperkuat kondisi tersebut:

“Petani bisa mengusulkan kegiatan lewat musyawarah. Selama ada RAB dan proposal yang masuk akal, biasanya kami bantu alokasikan dari Dana Desa.” (Wawancara; selasa 15 Juli 2025)

Proses ini menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan partisipatif telah berjalan di Kalurahan Girikerto, di mana kelompok tani dapat secara aktif menyampaikan aspirasi mereka melalui jalur resmi. Pemerintah Kalurahan menyarankan agar kelompok tani melengkapi setiap usulan dengan dokumen pendukung seperti proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga lebih mudah dipertimbangkan dalam forum musyawarah desa. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua usulan bisa langsung direalisasikan. Usulan tersebut tetap harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas pembangunan desa. Meski demikian, pemerintah desa menunjukkan keterbukaan untuk memfasilitasi kegiatan petani selama masih relevan dan memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pendekatan ini memberikan peluang bagi petani untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan desa, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah kalurahan dengan komunitas petani salak di wilayahnya.

Meskipun Dana Desa memiliki ruang lingkup penggunaan yang sangat luas, Pemerintah Kalurahan Girikerto menyampaikan bahwa alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan petani salak tetap diberikan, meskipun tidak dalam jumlah besar dan tidak setiap tahun. Dukungan tersebut biasanya diarahkan pada kegiatan yang sifatnya produktif dan berbasis pengembangan

ekonomi masyarakat, khususnya untuk kelompok tani atau UMKM pengolah salak.

Wawancara dengan Bapak Nurahman selaku Pamong Pemerintah memperkuat kondisi tersebut:

“Pernah, seperti untuk pengadaan bibit, pelatihan UMKM, dan ikut pameran produk. Tapi harus bersaing dengan sektor lain.” (Wawancara; Kamis 10 Juli 2025)

Salah satu contoh nyata adalah pengadaan bibit salak madu, yang diusulkan langsung oleh kelompok tani melalui musyawarah desa. Selain itu, pelatihan pengolahan salak menjadi berbagai produk turunan seperti dodol, keripik, kurma salak, teh kulit salak, hingga kopi biji salak juga difasilitasi oleh pemerintah kalurahan menggunakan Dana Desa. Kalurahan juga pernah membantu dalam hal biaya partisipasi kelompok dalam pameran produk unggulan daerah. Namun, karena Dana Desa juga harus dialokasikan untuk sektor lain seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sosial, maka alokasi untuk pertanian tidak selalu menjadi prioritas utama. Pemerintah desa harus mempertimbangkan banyak aspek dalam penyusunan APBKal, sehingga petani diimbau untuk menyusun usulan program sebaik mungkin agar dapat diperjuangkan dalam forum musyawarah desa.

Kendati begitu, alokasi yang diberikan tetap menunjukkan adanya komitmen pemerintah kalurahan untuk memberikan ruang dan dukungan bagi pengembangan komoditas salak sebagai potensi lokal, meski secara kuantitas anggarannya masih terbatas. Salah satu tantangan utama yang dihadapi petani salak di Kalurahan Girikerto adalah fluktuasi harga yang tidak menentu, terutama saat musim panen raya atau ketika pasokan melimpah di pasaran.

Pemerintah Kalurahan menyadari sepenuhnya bahwa turunnya harga salak sangat memengaruhi pendapatan petani, namun keterbatasan kewenangan desa dalam mengintervensi pasar membuat pemerintah kalurahan mengambil pendekatan yang lebih strategis.

Wawancara dengan Bapak Nurahman selaku Pamong Pemerintah menjelaskan bahwa:

“Kami sadari harga salak naik turun. Tapi karena ini menyangkut pasar, kami lebih mendorong petani untuk olah produk supaya nilai tambahnya stabil. (Wawancara; Kamis 10 Juli 2025)

Alih-alih mencoba mengontrol harga pasar, Pemerintah Kalurahan lebih memilih mendorong petani untuk mengolah salak menjadi produk turunan (olahan). Dengan demikian, salak tidak hanya dijual dalam bentuk buah segar, tetapi juga diproses menjadi produk bernilai tambah seperti dodol, kurma salak, keripik, teh kulit salak, dan kopi biji salak. Pendekatan ini dianggap lebih realistik dan berkelanjutan karena dapat memperluas pasar dan memperpanjang umur simpan produk. Pemerintah Kalurahan juga memfasilitasi pelatihan dan pendampingan UMKM salak olahan, terutama kepada ibu-ibu rumah tangga dan kelompok perempuan tani. Selain itu, pemasaran produk olahan juga dibantu melalui pameran lokal dan promosi digital, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal jaringan distribusi dan penjualan.

Secara keseluruhan, pendekatan yang diambil pemerintah desa lebih berfokus pada strategi adaptif dan penguatan kapasitas petani, bukan pada kontrol pasar secara langsung. Langkah ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah kalurahan dalam menjaga stabilitas pendapatan petani, meskipun

kewenangan mereka dalam regulasi harga sangat terbatas. Dalam konteks perlindungan jangka panjang terhadap keberlanjutan pertanian salak, Pemerintah Kalurahan Girikerto menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada aturan tertulis atau Peraturan Desa (Perdes) yang secara eksplisit melarang alih fungsi lahan pertanian, khususnya kebun salak, menjadi area nonpertanian seperti perumahan atau usaha lain. Namun demikian, pemerintah desa secara aktif memberikan imbauan kepada masyarakat, terutama petani, agar tetap mempertahankan fungsi lahan sebagai kebun salak.

Wawancara, Bapak krisna cahyan selaku carik Pemerintah Kalurahan Girikerto mengatakan:

“Tidak ada larangan tertulis, tapi kami imbau petani untuk tetap menjaga kebun salak. Soalnya kalau lahan dialihkan, produksi bisa menurun.” (Salasa 15 Juli 2025)

Pemerintah Kalurahan menyadari bahwa alih fungsi lahan akan berdampak langsung terhadap penurunan luas lahan produktif dan dalam jangka panjang bisa mengancam kelangsungan produksi salak pondoh dan salak madu sebagai komoditas unggulan desa. Oleh karena itu, upaya perlindungan dilakukan melalui pendekatan komunikasi langsung, sosialisasi, dan ajakan kepada petani untuk tetap mempertahankan kebun mereka. Imbauan ini juga berkaitan dengan upaya menjaga status Indikasi Geografis (IG) salak pondoh Sleman, di mana keberadaan dan konsistensi lahan kebun salak menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga kualitas dan identitas geografis produk.

Walaupun belum memiliki dasar hukum formal, pendekatan persuasif yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan dinilai cukup efektif karena mempertimbangkan realitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kalurahan berharap ke depan bisa menjalin kerja sama dengan dinas terkait dan DPRD untuk memperkuat perlindungan lahan pertanian melalui kebijakan yang lebih mengikat dan terencana. Pemerintah Kalurahan Girikerto menyadari bahwa dalam upaya mendukung dan melindungi petani salak, kerja sama lintas sektor dan lintas lembaga menjadi sangat penting. Oleh karena itu, kalurahan secara aktif membangun kemitraan dengan berbagai pihak eksternal, termasuk Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, BUMDes, perguruan tinggi, dan kelompok tani. Kolaborasi ini dilakukan baik dalam bentuk kegiatan pelatihan, bantuan sarana dan prasarana, hingga promosi dan pemasaran produk salak serta olahannya.

“Kami bekerja sama dengan Dinas Pertanian, BUMDes, dan kelompok tani. Misalnya untuk pelatihan, bantuan alat, atau promosi produk.” (Wawancara, Bapak Krisna Cahyan Selaku Carik Pemerintah Kalurahan Girikerto, Selasa 15 Juli 2025)

Kerja sama dengan Dinas Pertanian biasanya mencakup pelatihan budidaya, pendampingan teknis, serta fasilitasi alat pertanian dan bantuan obat-obatan. Sementara itu, melalui BUMDes, pemerintah kalurahan mendukung pengembangan usaha olahan salak dan pemasaran lokal. Peran kelompok tani juga sangat sentral karena menjadi mitra langsung dalam menjalankan berbagai kegiatan lapangan. Selain itu, pemerintah desa juga terbuka terhadap kerja sama dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi yang ingin melakukan pendampingan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat terkait pengelolaan salak di Girikerto. Dukungan dari pihak

eksternal ini dinilai sangat membantu, khususnya dalam aspek inovasi dan penguatan kapasitas petani.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Kalurahan Girikerto berharap pembangunan pertanian salak tidak hanya bertumpu pada kemampuan internal desa, tetapi juga didukung secara berkelanjutan oleh pihak luar yang memiliki keahlian dan sumber daya yang lebih luas. Pemerintah Kalurahan Girikerto menyampaikan bahwa seluruh kegiatan desa, termasuk program yang menyasar kelompok tani dan pelaku usaha olahan salak, dievaluasi secara rutin setiap akhir tahun anggaran. Evaluasi ini dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dibiayai oleh Dana Desa, sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan program berikutnya.

Wawancara, Bapak Nurahman selaku pamong Pemerintah Kalurahan Girikerto mengatakan:

“Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun anggaran. Biasanya kami lihat kegiatan mana yang berhasil, mana yang perlu perbaikan.” (Kamis 10 Juli 2025)

Proses evaluasi ini mencakup berbagai aspek, seperti capaian kegiatan, efektivitas pelaksanaan, dan dampak terhadap kelompok sasaran. Misalnya, jika program pelatihan UMKM salak telah berjalan, maka hasilnya akan ditinjau dari seberapa banyak peserta yang benar-benar mengembangkan produk olahan atau seberapa besar peningkatan penjualan yang terjadi. Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai bahan refleksi, apakah kegiatan serupa akan dilanjutkan, diperbaiki, atau diganti dengan pendekatan lain. Meskipun belum menggunakan sistem monitoring yang sangat formal atau berbasis

teknologi, pendekatan evaluasi berbasis partisipasi dan laporan lapangan tetap dilakukan, termasuk mendengar masukan dari kelompok tani. Pemerintah desa juga mencatat bahwa hasil evaluasi bisa menjadi dasar untuk pengajuan kerja sama ke pihak eksternal, seperti dinas atau lembaga swasta.

Dengan adanya evaluasi tahunan ini, Pemerintah Kalurahan Girikerto berupaya memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar memberi manfaat dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, termasuk petani salak sebagai kelompok yang strategis dalam penguatan ekonomi lokal desa. Melihat potensi dan tantangan yang dihadapi oleh petani salak di wilayahnya, Pemerintah Kalurahan Girikerto memiliki beberapa rencana pengembangan ke depan yang diarahkan untuk memperkuat posisi salak sebagai komoditas unggulan desa. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan jumlah dan kualitas pelatihan bagi petani dan pelaku UMKM olahan salak, baik dari segi budidaya, pengolahan, maupun pemasaran.

Wawancara, Bapak Skamirin sealaku kasih Pemerintah Kalurahan Girikerto

“Kami ingin dorong lebih banyak pelatihan, penguatan IG salak pondoh, dan kemitraan dengan pihak swasta atau perguruan tinggi.” (Senin 14 Juli 2025)

Selain pelatihan, pemerintah kalurahan juga berkomitmen untuk memperkuat pengakuan Indikasi Geografis (IG) terhadap salak pondoh dan salak madu sebagai bagian dari identitas pertanian Girikerto. Upaya ini dipandang penting agar produk salak lokal memiliki nilai jual lebih tinggi, diakui secara hukum, dan memiliki peluang untuk menembus pasar modern hingga ekspor. Ke depan, Pemerintah Kalurahan juga membuka peluang

kemitraan dengan lembaga eksternal, seperti perguruan tinggi, lembaga riset, maupun sektor swasta, untuk mendukung peningkatan kapasitas petani melalui riset, pengabdian masyarakat, dan inovasi teknologi. Kerja sama ini dianggap sebagai kunci untuk menciptakan model pertanian yang adaptif, berkelanjutan, dan bernilai tambah tinggi. Dengan arah kebijakan tersebut, Pemerintah Kalurahan Girikerto berharap bahwa petani salak tidak hanya mampu bertahan secara ekonomi, tetapi juga dapat berkembang secara mandiri dan profesional, serta mampu bersaing di pasar lokal, nasional, bahkan internasional.

C. Pandangan Petani terhadap Peran Dinas Pertanian

Informan menyebutkan bahwa Dinas Pertanian juga berperan penting dalam mendampingi petani untuk mendapatkan sertifikat GAP (Good Agricultural Practices) atau registrasi kebun, yang merupakan syarat agar salak dapat masuk ke pasar modern atau ekspor.

Ibu Endang selaku Ketua Kelompok Tani menyatakan:

“Kalau Dinas Pertanian itu, mengawal tentang registrasi kebun, sertifikat registrasi kebun, register kebun atau GAP... itu untuk syarat utama salaknya bisa untuk pasar modern atau ekspor.” (Rabu 22 Juli 2025)

Salah satu bentuk perlindungan dan dukungan dari Dinas Pertanian Kabupaten Sleman yang dianggap sangat penting oleh petani salak adalah fasilitasi sertifikat registrasi kebun atau GAP (Good Agricultural Practices). Sertifikat ini menjadi prasyarat utama bagi para petani agar produk salaknya bisa diterima di pasar modern dan memiliki peluang ekspor ke luar negeri. Tanpa sertifikat ini, hasil panen salak hanya dapat dijual di pasar lokal dengan

harga yang fluktuatif dan daya saing yang rendah. Dalam wawancara, informan menjelaskan bahwa sertifikat GAP merupakan dokumen resmi yang menunjukkan bahwa proses budidaya salak telah memenuhi standar pertanian yang baik, mulai dari penggunaan pupuk, pengendalian hama, sistem pemangkasan, hingga sanitasi lingkungan kebun. Petani yang memiliki sertifikat ini dianggap mampu memproduksi buah salak yang aman, bersih, dan layak konsumsi dalam skala yang lebih luas.

Informan juga menegaskan bahwa proses pengurusan sertifikat GAP ini sepenuhnya didampingi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sleman melalui PPL dan UPT. Para petani tidak bisa mengurus sendiri secara individu, melainkan dilakukan secara kolektif melalui kelompok tani atau Gapoktan. Pendampingan ini sangat penting karena ada banyak dokumen dan standar teknis yang harus dipenuhi, dan jika tanpa bimbingan, petani kemungkinan besar akan kesulitan. Pihak Dinas Pertanian membantu mulai dari proses pendataan lahan, verifikasi lapangan, hingga pengajuan dokumen ke instansi terkait. Mereka juga memberi edukasi terkait pentingnya pengelolaan kebun yang berkelanjutan, seperti larangan penggunaan pestisida berbahaya, pengelolaan limbah organik, serta pencatatan hasil produksi secara berkala. Dengan begitu, kebun salak dapat dinilai layak mendapat sertifikat GAP.

Informan menyebutkan bahwa keberadaan sertifikat ini telah membuka peluang yang lebih luas bagi kelompok tani dalam menjual hasil panennya ke pasar yang lebih stabil. Salak dari kebun yang tersertifikasi lebih dipercaya oleh pembeli besar, seperti supermarket dan eksportir, karena dianggap memiliki kualitas dan keamanan pangan yang terjamin. Hal ini tentu sangat

berdampak pada peningkatan pendapatan petani secara jangka panjang. Meski demikian, tidak semua petani telah memiliki sertifikat ini. Informan menjelaskan bahwa ada proses bertahap dalam pendampingan, sehingga hanya kelompok-kelompok yang sudah memenuhi persyaratan teknis yang bisa diusulkan terlebih dahulu. Namun demikian, komitmen dari Dinas Pertanian untuk memperluas cakupan sertifikasi ini terus dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

Secara umum, program sertifikasi registrasi kebun atau GAP ini dinilai sebagai langkah strategis dari pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk lokal dan memperluas akses pasar bagi petani salak. Selain meningkatkan kualitas produksi, keberadaan sertifikat juga mendorong perubahan perilaku petani agar lebih disiplin dalam mengelola kebun secara profesional dan ramah lingkungan. Selain bahan pertanian, informan juga menyampaikan bahwa petani menerima bantuan alat pertanian, termasuk kendaraan angkut hasil tani seperti viar, yang sangat membantu dalam kegiatan operasional kebun.

Di perkuat lagi dengan argumen bapak Sukma selaku petani salak

“Kemudian ada viar itu dari pemerintah lewat Dinas Pertanian, kemudian ada alat-alat pertanian... itu difasilitasi untuk kelompok tani.”(Jumat 24 Juli 2025)

Selain bantuan pupuk dan pendampingan teknis, Dinas Pertanian Kabupaten Sleman juga memberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian, seperti alat-alat pertanian dan kendaraan angkut hasil panen berupa Viar. Informan menyampaikan bahwa bantuan tersebut sangat membantu meringankan pekerjaan petani, terutama dalam proses pasca-panen yang

seringkali menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan sarana transportasi. Sebelum adanya bantuan kendaraan angkut seperti Viar, petani harus mengandalkan alat transportasi pribadi atau menyewa kendaraan untuk membawa hasil panen ke pasar atau tempat pengumpulan. Hal ini tidak hanya menyita waktu, tetapi juga menambah beban biaya operasional. Kehadiran kendaraan angkut hasil panen yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian menjadi solusi yang sangat dirasakan manfaatnya oleh kelompok tani.

Informan menyebutkan bahwa bantuan alat pertanian ini tidak diberikan kepada individu, melainkan disalurkan melalui kelompok tani atau Gapoktan. Dengan sistem ini, alat dapat digunakan secara bergiliran dan bersama-sama oleh seluruh anggota kelompok sesuai dengan kebutuhan dan jadwal yang telah disepakati. Pola ini menciptakan rasa tanggung jawab dan kepemilikan bersama, serta meminimalisir konflik dalam penggunaannya. Tidak hanya kendaraan, Dinas Pertanian juga memberikan alat-alat pendukung lain seperti alat semprot, peralatan panen, dan perlengkapan sanitasi kebun. Semua alat tersebut disimpan dan dikelola oleh sekretariat kelompok tani, yang juga difasilitasi dalam bentuk gedung kecil untuk menyimpan alat serta sebagai tempat rapat atau pelatihan anggota.

Dalam wawancara, informan juga menyebutkan bahwa fasilitas-fasilitas ini merupakan aset kelompok tani, namun sepenuhnya berasal dari dukungan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya hadir dalam bentuk kebijakan atau pelatihan, tetapi juga nyata dalam penyediaan kebutuhan fisik yang mendukung keberhasilan kegiatan pertanian. Bantuan alat pertanian ini dinilai sebagai bentuk investasi jangka panjang yang

memberikan dampak besar terhadap efisiensi kerja petani. Petani tidak lagi harus bekerja secara manual atau menyewa peralatan mahal, sehingga bisa lebih fokus pada peningkatan produktivitas dan pengelolaan hasil pertanian secara optimal.

Secara keseluruhan, pemberian alat pertanian dan kendaraan angkut oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sleman menambah bukti bahwa perhatian terhadap sektor pertanian semakin serius. Bantuan ini bukan hanya meningkatkan efektivitas kerja petani, tetapi juga menjadi pemicu semangat kolektif di kalangan kelompok tani untuk terus meningkatkan kualitas usaha tani salak secara bersama-sama. Dinas Pertanian menyampaikan program dan menampung aspirasi petani melalui PPL dan UPT. Petani menyampaikan kebutuhan dan keluhan kepada PPL, lalu diteruskan ke Dinas Pertanian sebagai bahan evaluasi atau dasar pemberian bantuan.

Ibu Endang selaku Ketua Kelompok Tani menyatakan:

“PPL itu adalah jembatan informasi yang disampaikan dari Dinas Pertanian kepada petani atau keluhan apapun dari petani kepada atasan itu lewat PPL. Jembatannya adalah PPL, bukan kelurahan. “Kalau mau tahu banyak tentang pertanian salak, bukan di kelurahan tapi ke UPT. PPL-nya tempat kami itu Bu Pinta, kepala UPT-nya Pak Sigit.”(Rabu 22 Juli 2025)

Dalam pelaksanaan berbagai program pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) memainkan peran yang sangat penting sebagai penghubung langsung antara petani salak dan Dinas Pertanian Kabupaten Sleman. Informan menekankan bahwa hampir semua komunikasi, penyampaian informasi, serta penyaluran bantuan dari pemerintah dilakukan melalui PPL yang bertugas di lapangan. PPL memiliki fungsi sebagai ujung tombak dinas, karena mereka yang terjun langsung ke

kebun-kebun milik petani untuk melakukan pendataan, sosialisasi program, hingga pendampingan teknis. Menurut informan, PPL menjadi perantara utama antara kebutuhan riil petani dan kebijakan pemerintah. Misalnya, jika petani membutuhkan bantuan pupuk atau pelatihan budidaya, mereka menyampaikannya kepada PPL, yang kemudian meneruskan aspirasi tersebut ke Dinas Pertanian melalui UPT wilayah masing-masing.

Informan menyebut secara spesifik nama PPL dan Kepala UPT yang bertugas di wilayah mereka, yaitu Bu Pinta Laksita sebagai PPL dan Pak Sigit Widianto sebagai Kepala UPT Wilayah V Pakem. Hal ini menunjukkan adanya kedekatan dan komunikasi yang cukup baik antara petani dan tenaga teknis di lapangan, yang menjadi kunci keberhasilan distribusi bantuan dan pelaksanaan program pemerintah. Melalui peran ini, UPT dan PPL tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga memfasilitasi proses administrasi seperti pengajuan proposal, pelaporan kegiatan kelompok tani, hingga verifikasi data untuk bantuan pertanian. UPT juga membantu dalam pengawasan penggunaan bantuan agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh kelompok penerima.

Informan juga menyampaikan bahwa kehadiran PPL sangat membantu petani dalam memahami aspek teknis pertanian secara lebih profesional. Mereka tidak hanya hadir saat ada bantuan, tetapi juga mendampingi proses budidaya dari awal hingga pasca panen. Dengan begitu, petani merasa lebih tenang karena mendapat dukungan penuh dari pemerintah melalui pendamping teknis yang kompeten. Kesimpulannya, peran UPT dan PPL sangat vital dalam menjembatani kebutuhan petani dengan kebijakan

pemerintah. Hubungan yang harmonis antara petani dan PPL menjadi salah satu faktor keberhasilan program-program pertanian salak di Kalurahan Girikerto. Tanpa peran PPL, maka informasi dan bantuan dari pemerintah akan sulit sampai tepat sasaran ke lapisan petani paling bawah.

Dinas Pertanian juga memberikan pelatihan dan pendampingan teknis kepada petani melalui PPL. Informan menegaskan bahwa semua petani dibekali keterampilan teknis, terutama dalam budidaya seperti pemangkasan, penyerbukan, sanitasi, hingga pemupukan.

Ibu Endang selaku Ketua Kelompok Tani menyatakan:

“Dasarnya ada di pemupukan, semua petani bisa melakukan pemangkasan, penyerbukan, sanitasi itu... tapi memang kami perlu didampingi secara teknis. Dan itu dari Dinas Pertanian melalui PPL.”
. (Rabu 22 Juli 2025)

Pendampingan budidaya, pelatihan, dan edukasi teknis merupakan salah satu bentuk dukungan yang sangat dirasakan oleh petani salak di Kalurahan Girikerto. Informan menyampaikan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, melalui PPL dan UPT, memberikan pendampingan secara langsung kepada petani dalam menjalankan praktik budidaya yang baik dan sesuai standar. Pendampingan ini tidak hanya diberikan sekali atau dua kali, tetapi dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan. Petani menerima berbagai pengetahuan teknis terkait cara merawat tanaman salak agar dapat menghasilkan buah yang berkualitas. Beberapa materi pendampingan yang diberikan antara lain tentang teknik pemupukan, pemangkasan daun dan batang, penyerbukan bunga secara manual, serta sanitasi kebun agar terhindar dari penyakit dan hama. Informan menegaskan

bahwa semua keterampilan tersebut diperoleh berkat bimbingan langsung dari PPL, bukan dari pihak Kalurahan.

Menurut informan, semua petani di wilayahnya memiliki dasar-dasar kemampuan budidaya salak secara turun-temurun. Namun, agar hasil panen bisa maksimal dan sesuai standar pasar, maka diperlukan pendampingan tambahan secara ilmiah dan teknis. Dalam hal ini, kehadiran PPL menjadi sangat krusial karena mereka mampu memberikan pengetahuan yang aplikatif dan mudah dipahami oleh petani.

Di perkuat lagi dengan argumen bapak Sukma selaku petani salak

“Dasarnya petani itu bisa melakukan sendiri, Mas. Tapi soal pemupukan, itu yang paling berat. Pendampingan dari PPL penting sekali supaya tahu dosis dan waktunya yang tepat, biar hasilnya optimal.” (jumat 25 Juli 2025)

Pelatihan juga sering dilakukan dalam bentuk pertemuan kelompok atau kunjungan lapangan. Dalam forum ini, petani diberikan contoh langsung mengenai cara melakukan kegiatan budidaya secara benar. Tidak hanya teknis budidaya, pelatihan juga mencakup manajemen kelompok tani, pencatatan produksi, hingga cara mengakses bantuan dan program pemerintah lainnya. Informan menyampaikan bahwa pelatihan dan pendampingan ini berdampak besar terhadap hasil produksi. Buah salak yang dirawat dengan cara yang benar memiliki ukuran yang lebih besar, rasa yang lebih manis, dan kulit yang lebih mulus semua itu menjadi daya tarik bagi pasar modern. Dengan demikian, edukasi teknis yang diberikan tidak hanya berdampak pada kualitas produk, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan petani.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendampingan teknis dari Dinas Pertanian melalui PPL bukan hanya bersifat pelengkap, tetapi merupakan komponen penting dalam keseluruhan proses pemberdayaan petani. Dengan adanya pelatihan dan edukasi yang rutin dan berkelanjutan, petani tidak hanya menjadi lebih mandiri dalam bertani, tetapi juga lebih siap bersaing dalam pasar yang menuntut standar kualitas tinggi. Meskipun sebagian besar bantuan dan pendampingan teknis bagi petani salak berasal dari Dinas Pertanian, informan menyampaikan bahwa Pemerintah Kalurahan tetap memiliki peran, meski dalam bentuk yang terbatas dan tidak langsung. Peran tersebut lebih diarahkan pada fasilitasi kegiatan kelembagaan petani, seperti Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), melalui alokasi Dana Desa.

Dinas Pertanian juga aktif mendukung forum-forum pertanian seperti Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis (KPIG) Salak Pondoh Sleman. Forum ini menjadi pusat koordinasi antar kelompok tani dari tiga kapanewon (Turi, Tempel, Pakem), dan setiap tanggal 10 diadakan pertemuan rutin yang juga didukung oleh Dinas Pertanian.

Ibu Endang selaku Ketua Kelompok Tani menyatakan:

“Pertemuan setiap tanggal sepuluh itu disupport oleh Dinas Pertanian, di sini pusatnya KPIG. Semua kelompok tani dari Turi, Tempel, Pakem mengirimkan pengurusnya ke sini.” .”(Rabu 22 Juli 2025)

Pernyataan Ibu Endang menegaskan bahwa Dinas Pertanian memiliki peran aktif dalam mendukung kegiatan koordinasi antar kelompok tani melalui forum rutin yang terstruktur. Pertemuan yang dilaksanakan setiap tanggal sepuluh tersebut menunjukkan adanya agenda tetap yang difasilitasi langsung oleh dinas, bukan hanya bersifat seremonial tetapi menjadi wadah

komunikasi dan konsolidasi bagi petani lintas wilayah. Hal ini membuktikan bahwa Dinas Pertanian tidak hanya hadir dalam kegiatan teknis di lapangan, tetapi juga memperkuat aspek kelembagaan kelompok tani.

Keberadaan KPIG (Kelompok Petani Integratif Gunung) sebagai pusat koordinasi memberikan ruang bagi seluruh kelompok tani dari wilayah Turi, Tempel, dan Pakem untuk saling berbagi informasi, strategi, dan permasalahan. Ini memperlihatkan model kolaborasi horizontal antar kelompok tani yang difasilitasi secara vertikal oleh Dinas Pertanian. Dengan adanya pertemuan ini, pengurus kelompok tani dapat mengidentifikasi kebutuhan bersama, menyampaikan aspirasi kolektif, dan menyusun langkah strategis yang lebih terorganisir. Dukungan Dinas Pertanian dalam forum tersebut juga mencerminkan komitmen institusi terhadap pemberdayaan kelembagaan tani. Tidak hanya sekadar memberikan pelatihan atau bantuan, tetapi juga mendorong terbentuknya jaringan komunikasi dan forum musyawarah antarkelompok tani. Ini sangat penting dalam membangun solidaritas dan memperkuat posisi petani dalam pengambilan kebijakan maupun dalam menghadapi tantangan pasar dan teknis budidaya.

Dengan demikian, forum rutin yang didukung oleh Dinas Pertanian dan dipusatkan di KPIG merupakan salah satu bentuk konkret dari keberpihakan dan fasilitasi pemerintah kepada petani. Melalui forum ini, terjadi aliran informasi yang lebih cepat dan akses terhadap peluang program yang lebih luas. Bagi kelompok tani seperti yang dipimpin oleh Ibu Endang, keberadaan pertemuan rutin ini menjadi sarana penting dalam menjaga keberlangsungan komunikasi dan koordinasi antara petani dan lembaga pemerintah.

D. Pandangan Petani terhadap Peran DPRD Sleman

Peran legislatif juga dirasakan dalam hal pengawalan anggaran. Informan menyebut bahwa banyak program yang sebelumnya terhenti atau terkena efisiensi bisa diperjuangkan kembali oleh anggota dewan yang peduli terhadap petani. Bahkan, beberapa kelompok tani mendapat perhatian khusus melalui program aspirasi dewan yang sifatnya langsung dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Ibu Endang selaku Ketua Kelompok Tani menyatakan:

“Sekarang ada efisiensi anggaran, Mbak. Beberapa program dipangkas, tapi kami bisa mengajukan kembali melalui dewan. Biasanya yang membidangi pertanian bisa bantu menyuarakan kebutuhan kita, misalnya soal pupuk atau pelatihan.”.”(Rabu 22 Juli 2025)

Dukungan dewan juga tidak bersifat langsung dalam bentuk barang, tetapi lebih pada fungsi advokasi dan kebijakan. Informan mengakui bahwa tidak semua permintaan petani dapat langsung dipenuhi, tetapi dengan adanya dukungan dari anggota dewan, setidaknya suara petani mendapat tempat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat kabupaten.

Di perkuat lagi dengan argumen bapak Sukma selaku petani salak

“Kita juga harus pintar menyiasati kondisi sekarang. Karena pos-pos anggaran itu banyak dipakai untuk program baru. Maka kita ajukan lewat dewan juga, supaya bisa tetap dapat bagian untuk petani.” (Jumat 25 Juli 2025)

Secara umum, peran dewan dianggap sebagai pelengkap dari dukungan pemerintah teknis dan Kalurahan. Legislatif berperan penting dalam membuka ruang aspirasi petani dan memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih pro-rakyat. Dengan adanya koordinasi antara dewan, Dinas Pertanian, dan kelompok tani, maka program pertanian bisa berjalan lebih efektif dan

menyentuh kebutuhan riil di lapangan. Informan menyampaikan bahwa anggota DPRD Kabupaten Sleman, khususnya dari Komisi B, turut hadir dan terlibat dalam kegiatan petani seperti pertemuan rutin Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis (KPIG). Kehadiran dewan ini penting sebagai bentuk dukungan moral dan politik terhadap petani, serta memastikan aspirasi petani tersampaikan langsung kepada wakil rakyat.

Ibu Endang selaku Ketua Kelompok Tani menyatakan:

“Ada pendampingan juga dari anggota dewan. Mereka ikut dalam kegiatan KPIG supaya semua informasi tidak putus, baik dari petani maupun ke pemerintah.” .”(Rabu 22 Juli 2025)

Menyampaikan aspirasi petani ke ranah kebijakan, agar program pertanian tetap mendapat prioritas. Peran legislatif tidak hanya simbolis, melainkan juga strategis dalam menyampaikan aspirasi petani ke dalam forum kebijakan, terutama ketika petani menghadapi persoalan teknis atau tidak mendapat dukungan penuh dari dinas. Dewan menjadi jembatan agar suara petani tetap terdengar di ruang pengambilan keputusan.

Ibu Endang selaku Ketua Kelompok Tani menyatakan:

“Dari dewan biasanya akan menyuarakan juga di rapat-rapat, kalau memang kelompok tani punya kebutuhan atau kendala.” .”(Rabu 22 Juli 2025)

Memperjuangkan anggaran melalui program aspirasi dewan, terutama saat ada pemangkasan dana teknis. Dalam kondisi anggaran daerah yang sering mengalami penyesuaian atau efisiensi, anggota dewan berperan penting dalam memperjuangkan agar program untuk petani tetap bisa berjalan. Salah satunya melalui program aspirasi dewan, yang

memungkinkan kelompok tani tetap mendapatkan fasilitas meskipun dana teknis dari dinas berkurang.

Di perkuat lagi dengan argumen bapak Sukma selaku petani salak

“Kalau ada program yang dipangkas dari dinas, biasanya kami mencoba lewat jalur dewan, karena mereka bisa bantu melalui aspirasi.”(Jumat 25 Juli 2025)

Mendorong pengakuan Indikasi Geografis (IG) untuk salak pondoh dan salak madu sebagai komoditas unggulan. Informan juga menyebutkan bahwa proses pendaftaran dan pengakuan Indikasi Geografis (IG) salak pondoh dan salak madu melibatkan peran legislatif. Pengakuan IG sangat penting karena menyangkut legalitas, perlindungan produk, dan perluasan pasar, termasuk untuk ekspor. Legislator mendukung dari sisi regulasi dan anggaran pendukung.

Ibu Endang selaku Ketua Kelompok Tani menyatakan:

“Proses IG itu panjang dan tidak bisa dari petani saja. Harus didorong juga oleh dewan supaya kuat secara hukum dan punya daya saing.” .”(Rabu 22 Juli 2025)

Mendukung pengembangan UMKM dan akses pasar bagi produk olahan salak. Tidak hanya fokus pada budidaya, anggota dewan juga ikut mendorong penguatan UMKM salak olahan, seperti dodol, keripik, kurma salak, kopi biji salak, dan lainnya. Dukungan ini termasuk dalam bentuk pelatihan, promosi produk di kegiatan resmi, hingga memperluas akses ke pasar lokal dan regional melalui event atau kerja sama antarinstansi.

Di perkuat lagi dengan argumen bapak Sukma selaku petani salak

“Produk olahan salak kami juga pernah ditampilkan di event kabupaten dan itu semua juga karena ada dorongan dari dewan supaya bisa dikenal.” (Jumat 25 Juli 2025)

Peran DPRD Kabupaten Sleman, khususnya anggota yang membidangi sektor pertanian seperti Komisi B, dipandang strategis oleh petani dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Legislator menjadi aktor penting dalam mengawal anggaran dan menjaga keberlanjutan program pertanian, terutama di tengah kondisi efisiensi anggaran daerah. Dalam situasi di mana banyak program teknis dari dinas dipangkas, petani masih memiliki peluang mengakses dukungan melalui jalur aspirasi dewan. Hal ini dibuktikan oleh pengalaman kelompok tani yang berhasil menyuarakan kembali kebutuhan seperti pelatihan dan bantuan pupuk melalui dukungan legislatif.

Fungsi utama DPRD dalam konteks pertanian lebih mengarah pada peran advokasi dan kebijakan, bukan pemberian bantuan langsung. Namun, peran ini sangat berarti karena memastikan bahwa suara petani tetap masuk dalam ruang-ruang pengambilan keputusan di tingkat kabupaten. Kehadiran anggota dewan dalam forum-forum seperti KPIG juga memperkuat hubungan antara petani dan pemerintah, serta menjadi saluran komunikasi dua arah agar informasi dan kebutuhan lapangan tersampaikan secara utuh.

Dukungan dewan juga mencakup aspek strategis lainnya, seperti mendorong pengakuan Indikasi Geografis (IG) untuk salak pondoh dan salak madu. Proses ini dinilai penting untuk memberikan legitimasi hukum serta memperluas daya saing komoditas salak di pasar nasional dan ekspor. Peran legislatif dalam mendukung proses administratif dan alokasi anggaran untuk pengurusan IG memperlihatkan kedulian mereka tidak hanya pada produksi, tetapi juga pada perlindungan dan pemasaran hasil pertanian.

Tidak hanya terbatas pada sektor hulu, anggota dewan juga memberi perhatian pada pengembangan hilirisasi produk olahan salak melalui dukungan terhadap UMKM. Petani merasakan manfaat nyata dari promosi produk mereka dalam event resmi kabupaten, yang sebagian besar didorong oleh legislator. Dengan demikian, peran DPRD Kabupaten Sleman dipandang tidak hanya pelengkap, tetapi menjadi pendorong utama dalam memperluas akses petani terhadap program, kebijakan, dan pasar, serta memperkuat posisi petani dalam sistem pembangunan daerah.

E. Peran sebagai Dinamisator

Peran dinamisator dari pemerintah desa mengacu pada upaya menghidupkan, menggugah, dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Dalam konteks pertanian salak, peran ini tercermin melalui pembentukan dan penguatan kelompok tani, kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan teknis yang rutin dan berkelanjutan. Namun, hasil temuan di Kalurahan Girikerto menunjukkan bahwa peran dinamisator ini masih belum berjalan maksimal.

Secara kelembagaan, kelompok tani memang telah dibentuk dan diakui secara formal oleh pemerintah desa. Namun, kelompok ini sebagian besar bersifat pasif dan hanya aktif saat penyaluran bantuan. Aktivitas rutin seperti pertemuan bulanan, diskusi teknis, maupun evaluasi hasil panen hampir tidak berjalan. Pemerintah desa pun belum memiliki agenda rutin yang mendorong pemberdayaan kelompok tani secara menyeluruh.

Wawancara dengan Ibu Endang selaku Ketua Kelompok Tani menyatakan:

“Kelompok tani sih ada, tapi ya cuma aktif kalau mau dapat pupuk atau bantuan. Jarang ada kumpul rutin atau pelatihan. Jadi ya masing-masing jalan sendiri-sendiri.” .”(Rabu 22 Juli 2025)

Tidak adanya fasilitasi pelatihan dari desa menjadi salah satu faktor rendahnya motivasi petani untuk meningkatkan kapasitasnya. Sebagian petani merasa bahwa menanam salak sudah menjadi rutinitas turun-temurun, sehingga tidak perlu ada inovasi baru. Padahal, tantangan seperti serangan hama, perubahan iklim, dan anjloknya harga membutuhkan respons yang adaptif dan kreatif yang seharusnya difasilitasi oleh pemerintah desa sebagai dinamisator.

Wawancara, Bapak Skamirin sealaku kasih Pemerintah Kalurahan Girikerto:

“Pemerintah desa sebenarnya ingin mengadakan pelatihan pengolahan salak, tapi memang belum dianggarkan. Fokus anggaran masih ke infrastruktur dan bantuan langsung.” (Jumat 25 Juli 2025)

Minimnya pelatihan juga membuat petani tidak terpapar pada potensi inovasi produk olahan salak. Hingga saat ini, tidak ditemukan inisiatif desa dalam mendorong diversifikasi usaha tani melalui pengolahan produk seperti sirup, dodol, atau kombucha salak. Padahal, pendekatan ini dapat membuka peluang pasar baru dan memperkuat posisi tawar petani di luar musim panen raya.

Selain itu, belum ada upaya yang konsisten dari pemerintah desa untuk mendorong regenerasi petani. Generasi muda di Girikerto cenderung meninggalkan pertanian karena dianggap tidak menjanjikan. Pemerintah desa belum menyusun strategi atau program khusus yang bisa menarik minat

pemuda untuk kembali bertani salak dengan pendekatan yang lebih modern, misalnya melalui pertanian digital, inkubasi bisnis, atau pelatihan kewirausahaan pertanian. Dari seluruh temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi dinamisator pemerintah desa masih berjalan secara terbatas. Tanpa adanya dorongan aktif dari kalurahan untuk menghidupkan kelompok tani dan memfasilitasi peningkatan kapasitas petani, maka posisi petani akan tetap lemah dan cenderung statis menghadapi perubahan zaman. Pemerintah desa perlu mengambil inisiatif sebagai penggerak utama yang membangkitkan semangat kolektif dan kreativitas petani agar pertanian salak tetap bertahan dan berkembang.

F. Peran sebagai Katalisator

Sebagai katalisator, pemerintah desa seharusnya berperan mendorong sinergi antar aktor pembangunan baik internal desa, antardesa, maupun dengan lembaga eksternal guna mempercepat terwujudnya kemandirian dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Dalam konteks petani salak di Kalurahan Girikerto, peran ini sangat strategis untuk memperkuat kolaborasi dengan Dinas Pertanian, perguruan tinggi, BUMKal, maupun mitra swasta yang berpotensi membuka akses baru bagi petani dalam hal teknologi, pasar, dan inovasi. Namun, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa belum optimal dalam mengaktifkan peran ini.

Hingga saat ini, belum ada kerja sama formal antara Pemerintah Kalurahan Girikerto dengan lembaga eksternal seperti universitas atau lembaga pelatihan pertanian. Program penguatan kapasitas petani masih

sepenuhnya bergantung pada inisiatif Dinas Pertanian Sleman, yang frekuensinya tidak menentu. Pemerintah desa juga belum memetakan potensi mitra strategis yang dapat digandeng untuk mendukung keberlanjutan sektor pertanian salak secara sistematis.

Wawancara bapak Sukma selaku petani salak menyatakan:

“Kalau desa mau serius, bisa sebenarnya ngajak kampus atau koperasi untuk bantu petani. Tapi sampai sekarang belum ada gerakan seperti itu dari desa. Semuanya masih jalan sendiri-sendiri.” .”(Jumat 25 Juli 2025)

Di sisi lain, pemanfaatan Dana Desa untuk program yang secara khusus ditujukan bagi petani salak juga belum terlihat secara signifikan. Dana Desa sebagian besar terserap untuk pembangunan fisik, kegiatan rutin desa, dan program bantuan langsung. Padahal, Dana Desa dapat digunakan untuk membentuk unit usaha BUMKal berbasis komoditas unggulan seperti salak, yang akan membantu dari sisi hulu hingga hilir, mulai dari pembibitan, pascapanen, hingga distribusi hasil panen.

Wawancara, Bapak Skamirin sealaku kasih Pemerintah Kalurahan Girikerto :

“Sampai sekarang, belum ada BUMKal yang mengelola usaha salak. Fokus kami masih ke pengembangan infrastruktur. Ke depan memang perlu dipikirkan agar dana desa bisa menyentuh langsung petani.” (Senin 14 juli 2025)

Minimnya inovasi kelembagaan ekonomi desa yang berpihak pada petani mengindikasikan belum munculnya strategi jangka panjang dari pemerintah desa untuk menjadikan salak sebagai kekuatan ekonomi lokal. Sebagai contoh, tidak ada upaya untuk mengembangkan branding salak pondoh Girikerto, padahal daerah ini termasuk sentra utama dengan luas

lahan cukup signifikan. Pemerintah desa belum memanfaatkan status Indikasi Geografis (IG) sebagai keunggulan kompetitif untuk mengangkat citra dan nilai jual salak di pasar yang lebih luas.

Padahal, peran katalisator tidak hanya berarti menghubungkan, tetapi juga memicu lahirnya inisiatif dan inovasi dari masyarakat desa itu sendiri. Pemerintah desa bisa berperan sebagai penggugah ide, memfasilitasi forum diskusi antarpetani, mempertemukan pelaku usaha lokal, serta menyiapkan kader muda desa yang bisa didorong menjadi pelaku wirausaha pertanian modern. Namun saat ini, forum semacam itu masih belum dijalankan secara rutin maupun strategis.

Kesimpulannya, Pemerintah Kalurahan Girikerto belum maksimal menjalankan peran sebagai katalisator. Potensi besar yang dimiliki baik dari sisi geografis, komoditas, maupun jaringan social belum digerakkan secara optimal untuk membangun ekosistem pertanian salak yang berkelanjutan. Diperlukan langkah proaktif dari desa untuk menjalin kolaborasi lintas sektor dan merancang kebijakan inovatif berbasis potensi lokal yang mampu melibatkan berbagai aktor secara inklusif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketersediaan Regulasi yang Berpihak kepada Petani

Belum tersedia regulasi tingkat kalurahan yang secara tegas melindungi petani salak, khususnya dalam hal alih fungsi lahan dan stabilitas harga. Tidak adanya kebijakan desa yang mengikat menjadikan perlindungan terhadap lahan dan kesejahteraan petani sangat lemah.

2. Peran Pemerintah Kalurahan Girikerto dalam Melindungi Petani Salak

Peran pemerintah kalurahan bersifat fasilitatif dan reaktif, belum menunjukkan inisiatif strategis dalam perlindungan petani. Pemerintah desa hanya bertindak jika ada usulan dari petani, sehingga tidak ada jaminan perlindungan jika petani pasif atau tidak memiliki kapasitas administratif.

3. Pandangan Petani Salak Terhadap Peran Dinas Pertanian

Dinas Pertanian dianggap lebih konkret dan aktif dalam memberikan dukungan melalui program, pelatihan, dan pendampingan. Ketergantungan pada lembaga di luar desa menunjukkan lemahnya struktur dan inisiatif lokal dalam mendukung petani.

4. Pandangan Petani Salak Terhadap Peran DPRD Kabupaten Sleman

Anggota DPRD, khususnya Komisi B, berperan penting dalam memperjuangkan anggaran dan menyuarakan kepentingan petani di

tingkat kebijakan. Representasi politik petani lebih banyak difasilitasi oleh pihak luar, bukan melalui mekanisme kebijakan desa.

5. Peran Pemerintah Kalurahan Girikerto Sebagai Dinamisator

Peran sebagai dinamisator belum maksimal karena kurangnya inisiatif dan keberanian desa untuk mendorong perubahan struktural bagi petani. Kegiatan pembangunan dan perlindungan petani tidak bersumber dari ide desa, melainkan tergantung pada program eksternal dan partisipasi petani.

6. Peran Pemerintah Kalurahan Girikerto Sebagai Katalisator

Pemerintah desa belum mampu menjadi katalisator perubahan karena belum menginisiasi regulasi, kelembagaan koperasi, atau sistem perlindungan harga. Tidak adanya peran pendorong yang kuat dari pemerintah desa menyebabkan petani sulit berkembang secara berkelanjutan dan kompetitif.

B. Saran

1. Pemerintah Kalurahan Girikerto perlu segera merumuskan Peraturan Kalurahan (Perkal) yang secara khusus mengatur perlindungan lahan salak sebagai komoditas unggulan. Regulasi ini penting untuk mencegah alih fungsi lahan dan menjamin keberlanjutan ekonomi petani salak.
2. Optimalisasi Dana Desa untuk sektor pertanian perlu dilakukan melalui pendekatan perencanaan partisipatif. Pemerintah desa dapat menyusun skema insentif, pelatihan pascapanen, dan penguatan koperasi tani agar petani tidak hanya bergantung pada tengkulak dan memiliki akses pasar yang lebih luas.

3. Sinergi antara Kalurahan, Dinas Pertanian, dan DPRD harus ditingkatkan melalui forum rutin seperti KPIG dan musyawarah pembangunan desa. Kolaborasi lintas lembaga ini dapat memperkuat sistem perlindungan dan memperluas akses petani terhadap program-program pertanian.
4. Kelompok tani dan Gapoktan perlu terus didorong untuk aktif menyusun program kerja dan mengajukan RAB secara tertib agar mendapatkan dukungan. Namun demikian, perlu ada pendampingan administratif dari pemerintah desa untuk kelompok yang belum memiliki kapasitas teknis yang memadai.
5. Pemerintah Kabupaten Sleman sebaiknya mempertimbangkan penyusunan kebijakan daerah yang memperkuat status Indikasi Geografis (IG) salak pondoh, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga pada sisi pemasaran, promosi, dan distribusi agar manfaatnya lebih dirasakan oleh petani.

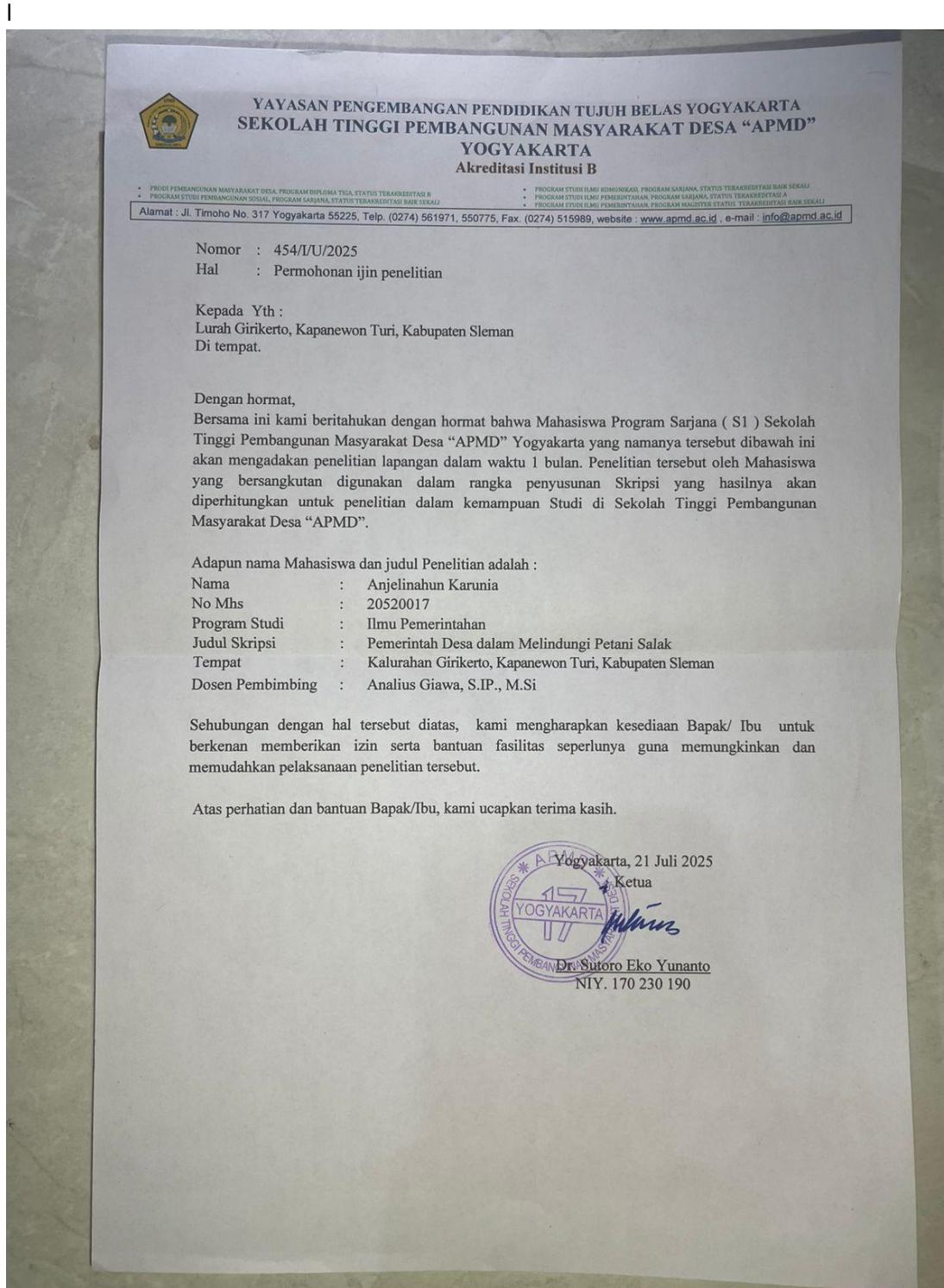
DAFTAR PUSTAKA

- Adhawati. (2012). *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Petani*. [Artikel Ilmiah].
- Anggraeni, V. K., Lestari, E., & Widiyanto. (2015). Strategi Adaptasi Petani Salak terhadap Dampak Erupsi Merapi di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. *Jurnal AGRISTA*, 3(2).
- Ariningsih, E., dkk. (2022). Kerugian Ekonomi dan Manajemen Pengendalian Serangan Lalat Buah pada Komoditas Hortikultura di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*.
- Chambers, R., & Conway, G. R. (1992). *Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century*. IDS Discussion Paper 296.
- Cook, Steven. 2007. Rulling but not Governing: The Military and Political Development in Egypt, Algeria, and Turkey. Baltimore: JHU Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ellis, F. (2000). *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. Oxford University Press.
- Eko, S. (2011). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press.
- Eko, Sutoro. 2021. Goverment Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan. Governabilitas: Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta Volume 2, Nomor 1, Juni 2021.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.
- Hanggaeni, D. H. P., dkk. (2024). Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Kombucha Salak Bali Kelompok Tani Mekar Sari, Sibetan, Karangasem, Bali. *I-Com: Indonesian Community Journal*.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nersi, N. (2024). Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Produk Olahan Salak di Kalurahan Purwobinangun,

- Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman. [Skripsi]. STPMD “APMD” Yogyakarta.
- Nirmalasari, G. T. (2024). Proteksi Petani Salak Pondoh di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman. [Skripsi]. STPMD “APMD” Yogyakarta.
- Nippi, A. T., & Pananrangi, A. M. (2019). Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Siawung. *Meraja: Jurnal Pemerintahan dan Politik Desa*, 2(1).
- Putranti, D., & Indriyani, D. A. (2021). Perlindungan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi di Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(3).
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya. *Governance*, 1(2).
- Sherwood, R. M. (1990). *Intellectual Property and Economic Development*. Westview Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zahida, I. M., Putri, S. R., & Wicaksono, A. S. (2021). Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Kabupaten Trenggalek). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Perundang-Undangan:**
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

LAMPIRAN

LAMPIRAN



Suart Permohonan Izin Penelitian

**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMATICA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEDAKI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI BAIK SEDAKI
Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 252/I/T/2025

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Anjelinahun Karunia
Nomor Mahasiswa : 20520017
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman
b. Sasaran : Pemerintah Desa dalam Melindungi Petani Salak
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 21 Juli 2025



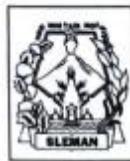
PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

Surat Tugas



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON TURI

PEMERINTAH KALURAHAN GIRIKERTO
କାଲୁରାହାନ ଗିରିକେର୍ତୋ

Alamat : Soprayan, Girikerto, Turi, Sleman, 55551
Telp: 0651-7155-1948
email : desa_girikertoku@gmail.com & desagirikerto@slemankab.go.id
web : www.girikerto.slemankab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/113/GK/VII/2025

Dasar : 1. Surat Edaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/01218 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP).
2. Surat edaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Nomor 423.4/10 Bappeda/2020 tentang Kuliah Kerja Nyata .
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor: 16 Tahun 2022 Tentang Izin Penelitian, Izin kuliah Kerja Nyata, dan Izin Praktek Lapangan.

Menunjuk : Surat dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta nomor 454/I/U/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Permohonan Ijin Penelitian.

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Krisna Cahyana, S.H.
Jabatan : Carik Girikerto

MENERANGKAN :

Nama	: Anjelinahun Karunia
NIM	: 20520017
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Instansi/ Perguruan Tinggi	: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi	: Jl. Timoho No 317 Yogyakarta
Keterangan	: Memberikan izin Penelitian di Kalurahan Girikerto
Judul Tugas Akhir	: Pemerintah Desa dalam Melindungi Petani salah
Lokasi	: Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman
Waktu	: Juli-Agustus 2025
Dosen Pembimbing	: Analius Giawa, S.I.P., M.Si

Dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu melapor kepada Dukuh setempat
2. Wajib menjaga ketertiban dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Lurah
4. Tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintahan,
5. Tidak diberlakukan untuk mengadakan pemaksaan
6. Surat keterangan ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan ketentuan tersebut diatas.

Dikeluarkan di Girikerto
Pada tanggal 24 Juli 2025



Surat Balasan Dari Pemerintah Kalurahan Girikerto



Foto Bersama Carik



Foto Bersama Pangripta



Foto Bersama Ulu-ulu



Foto Bersama Ketua Kelompok Tani



Foto Kebun Salak



Foto Produk Manisan Salak



Foto Sekretariat KGIP



Foto Tempat Penjualan Salak